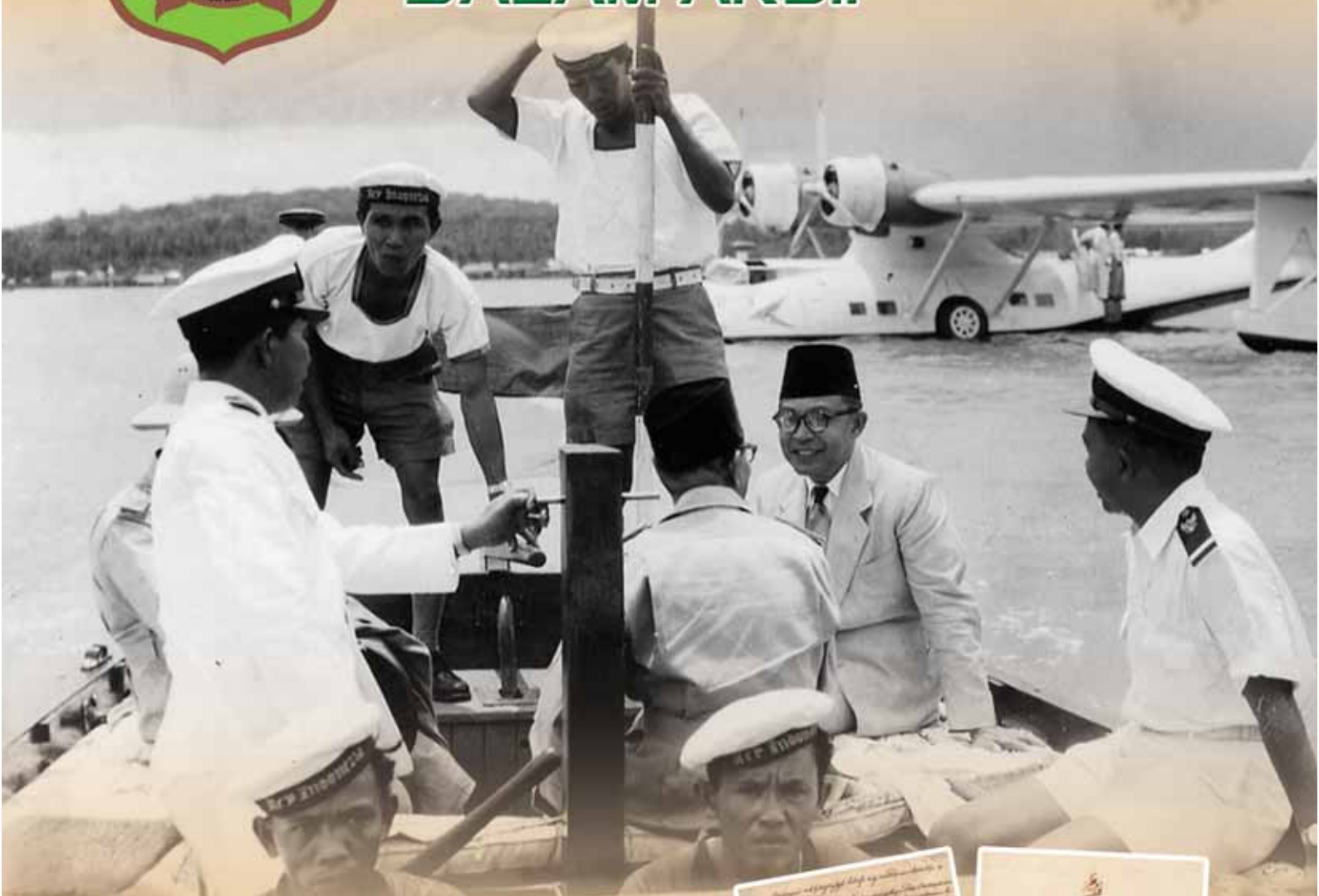




CITRA KOTA TANJUNGPINANG DALAM ARSIP



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2015



CITRA

KOTA TANJUNGPINANG

DALAM ARSIP

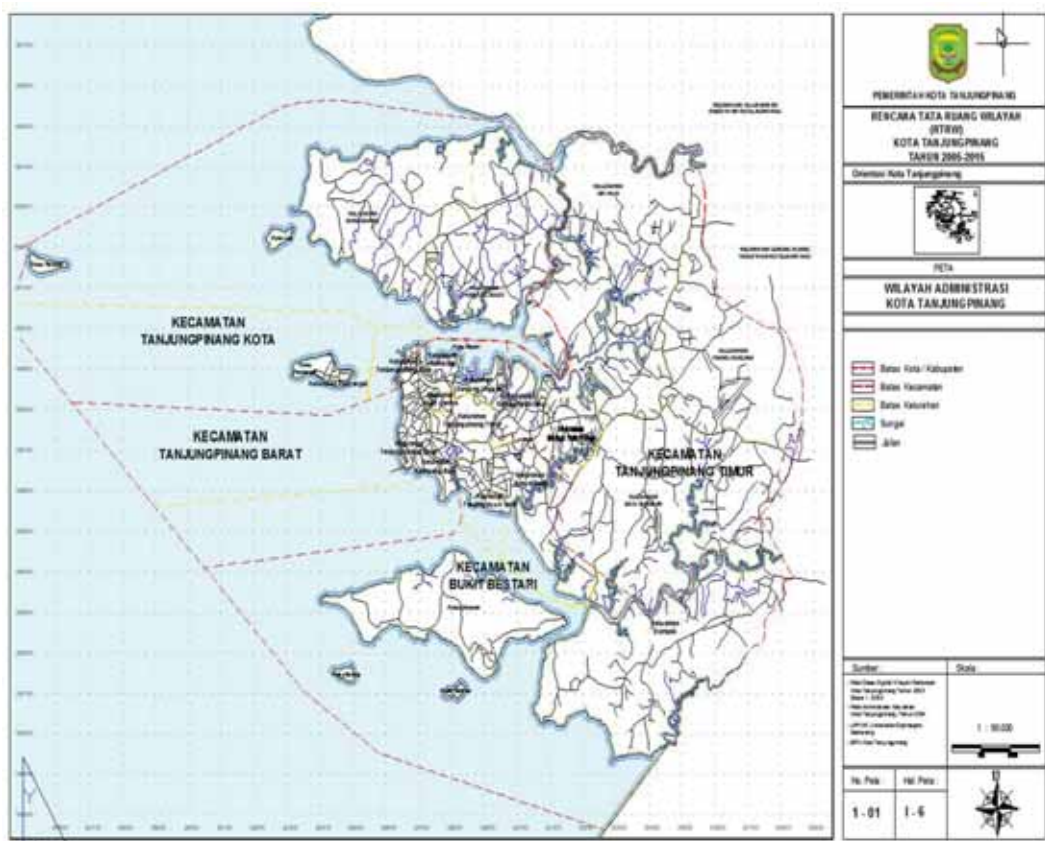


Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id



Peta Wilayah Kota Tanjungpinang
Sumber: Badan Informasi Geospasial



Lambang Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang



H. Lis Darmansyah, SH
Walikota Tanjungpinang
Periode 2013 s.d. 2018



H. Syahrul, S.Pd
Wakil Walikota Tanjungpinang
Periode 2013 s.d. 2018



Drs. Riono, M.Si
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
Periode 2014 s.d. 2019



Suparno
Ketua DPRD Kota Tanjungpinang
Periode 2014 s.d. 2019

WALIKOTA TANJUNG PINANG DARI MASA KE MASA



ASMUNI HASYMI, SH
WALIKOTA ADMINISTRATIF TANJUNGPINANG
PERIODE 1983 - 1985



DRS. H.M. SANI
WALIKOTA ADMINISTRATIF TANJUNGPINANG
PERIODE 1985 - 1992



DRS. ANDI RIVAI SIREGAR
WALIKOTA ADMINISTRATIF TANJUNGPINANG
PERIODE 1992 - 1995



DRA. SURYATATI A. MANAN
WALIKOTA ADMINISTRATIF TANJUNGPINANG
PERIODE 1995 - 2000



Dra. Hj. SURYATATI A. MANAN
WALIKOTA TANJUNGPINANG
PERIODE 2002 - 2007



Dra. Hj. SURYATATI A. MANAN
WALIKOTA TANJUNGPINANG
PERIODE 2007 - 2013



H. Lis Darmansyah, SH
Walikota Tanjungpinang
Periode 2013 - 2018

SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL RI



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku bangsa, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman tersebut. Keanekaragaman yang disandang Indonesia menjadi indah bagaikan warna-warni pelangi. Keanekaragaman Indonesia tersebut kemudian mengkristal dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**.

Keanekaragaman dan warna-warni indah Indonesia tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip menjadi deposit sejarah yang terus bertumbuh secara akurat. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa: “Dari semua asset yang ada, arsip adalah asset negara yang paling berharga” (Sir Arthur Doughty, 1924). Wilayah boleh membelah diri, daerah boleh mengurus diri sendiri-sendiri, tetapi arsip tetap sebagai jati diri. Arsip merupakan warisan nasional. Oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan. Keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa utuh dan lengkap arsipnya (Sir Arthur Doughty, 1924).

Khazanah kearsipan mengenai Kota Tanjungpinang banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), baik menyangkut adat istiadat, kebudayaan, kehidupan politik, kunjungan kenegaraan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan arsip yang merefleksikan keindahan seni dan budaya Kota Tanjungpinang. Dalam rangka penguatan otonomi daerah, arsip tersebut diinformasikan kembali kepada masyarakat Kota Tanjungpinang melalui program ANRI yang disebut dengan Citra Daerah. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan upaya mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam dalam Citra Kota Tanjungpinang Dalam Arsip.

Program Citra Daerah bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungannya, memupuk kebanggaan dan rasa cinta terhadap Tanah Air, menghargai keberagaman, membangun solidaritas, memupuk rasa persatuan dan memperkokoh kesatuan bangsa, sekaligus mendukung pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.

Citra Daerah ini diterbitkan dengan dukungan data yang terkandung dalam arsip. Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah merupakan rumusan dari kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Kesadaran sejarah ini diharapkan dapat menjadi landasan moral yang kokoh untuk pijakan melompat ke masa depan yang lebih baik. Kesadaran sejarah ini merupakan modal dasar yang kokoh dalam memperkuat pengembangan Otonomi Daerah. Daerah yang kuat dan berkarakter menjadi prasyarat tegaknya NKRI. Citra Daerah Kota Tanjungpinang jauh dari sempurna. Keterbatasan halaman menjadikan Citra Daerah hanya memuat sebagian kecil dari data kearsipan mengenai Kota Tanjungpinang yang tersimpan di ANRI. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang khususnya di bidang kearsipan.

Jakarta, November 2015

Kepala,

Dr. Mustari Irawan

DAFTAR ISI

Peta Wilayah Kota Tanjungpinang	i
Lambang Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang	ii
Walikota Tanjungpinang	iii
Wakil Walikota Tanjungpinang	iv
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	v
Ketua DPRD Kota Tanjungpinang	vi
Walikota Tanjungpinang Dari Masa Ke Masa	vii
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI	viii
Daftar Isi	xi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Sekilas Sejarah Tanjungpinang	3
1. Masa Kolonial	4
2. Masa Republik Indonesia	6
CITRA KOTA TANJUNGPINANG DALAM ARSIP	9
A. Geografis	10
B. Politik dan Pemerintahan	19
C. Pendidikan	40
D. Perekonomian	49
E. Infrastruktur	56
F. Transportasi	75
G. Keagamaan	82
H. Sosial Budaya	88
Daftar Arsip	92
Penutup	101

PENDAHULUAN

CITRA KOTA TANJUNGPINANG DALAM ARSIP

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Tanjungpinang atau sebelumnya disebut Tanjungpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini terkenal dengan sebutan Kota Gurindam Dua Belas, karena tidak terlepas dari keberadaan Pulau Penyengat, dimana bersemayam para Raja-Raja Riau (ANRI, Riouw 223/10) salah satunya Raja Ali Haji, yang termasyhur dengan karya sastranya Gurindam Dua Belas. Saat ini Pulau Penyengat menjadi salah satu Kelurahan di Kota Tanjungpinang.

Secara geografis, Kota Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan pada koordinat 00 51' s/d 00 59' LU dan 104 23' s/d 104 34' BT, dengan batas wilayahnya, sebelah Utara Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Sebelah Selatan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, Sebelah Barat Kecamatan Galang Kota Batam, dan Sebelah Timur Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan. Luas Kota Tanjungpinang saat ini 239,50 KM2 dengan jumlah penduduk 203.153 jiwa (data hingga bulan Desember 2014).

Secara geologis, sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur. Kota Tanjungpinang maupun Pulau Bintan keseluruhan beriklim tropis dengan temperatur 23 °C – 34 °C. Tekanan udaranya berkisar antara 1.010,2 mbs dan 1.013,7 mbs.

Sedangkan penduduk Tanjungpinang didominasi oleh Suku Melayu yang merupakan penduduk asli dan kelompok suku bangsa yang dominan di Tanjungpinang, selain itu terdapat juga suku Bugis dan Tionghoa yang sudah ratusan tahun berbaur dengan suku Melayu dan menjadi penduduk tetap semenjak zaman Kesultanan Johor Riau dan Residentie Riouw (ANRI, Riouw No. 223.6). Suku Bugis awalnya menetap di Kampung Bugis dan suku Tionghoa banyak menempati Jalan

Merdeka dan Pagar Batu, sedangkan Suku Jawa mulai ramai mendatangi Tanjungpinang pada tahun 1960, pemukiman awal suku Jawa terletak di Kampung Jawa.

Bahasa yang digunakan di Tanjungpinang adalah bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu di kota ini hampir sama dengan bahasa Melayu yang digunakan di Singapura, Johor, Pahang, Selangor, hingga Malaka, karena memang sejak zaman pemerintahan kesultanan Riau Lingga dahulu Tanjungpinang sudah menjadi pusat budaya Melayu bersama Singapura. Selain itu bahasa Tiochiu dan Hokkien juga banyak digunakan oleh suku Tionghoa di Kota Tanjungpinang.

B. SEKILAS SEJARAH TANJUNGPINANG

Tanjungpinang telah dikenal sejak lama. Hal ini disebabkan posisinya yang strategis di Pulau Bintan sebagai pusat kebudayaan Melayu dan lalu lintas perdagangan. Keberadaan Tanjungpinang semakin dikenal pada masa Kerajaan Johor pada masa Sultan Abdul Jalil Syah yang memerintahkan Laksamana Tun Abdul Jamil untuk membuka suatu Bandar perdagangan yang terletak di Pulau Bintan, tepatnya di Sungai Carang, Hulu Sungai Riau. Bandar yang baru tersebut menjadi Bandar yang ramai yang kemudian dikenal dengan Bandar Riau. Peranan Tanjungpinang sangat penting sebagai kawasan penyangga dan pintu masuk Bandar Riau (ANRI, Topografi 1403/Blad VI/70).

Kepiawaian pemerintahan pada masa itu menjadikan Bandar Riau merupakan bandar perdagangan yang besar dan bahkan menyaingi bandar Malaka yang masa itu telah dikuasai Portugis dan akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Dalam beberapa riwayat dikisahkan para pedagang yang semulanya ingin berdagang di Malaka kemudian berbelok arah ke Riau, dan bahkan orang-orang Malaka membeli beras dan kain di Riau. Hal ini disebabkan Bandar Riau merupakan kawasan yang aman dengan harga yang relatif bersaing dengan bandar Malaka. Selain sebagai pusat perdagangan, Bandar Riau dikenal sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Johor - Riau. Beberapa kali pusat pemerintahan berpindah - pindah dari Johor ke Riau maupun sebaliknya.

1. MASA KOLONIAL

Keberadaan Tanjungpinang semakin diperhitungkan pada peristiwa Perang Riau pada tahun 1782-1784 antara Kerajaan Riau dengan Belanda, pada masa Pemerintahan Yang Dipertuan Muda Raja Haji Fisabilillah. Peperangan selama 2 tahun ini mencapai puncaknya pada tanggal 6 Januari 1784 dengan kemenangan pada pihak Kerajaan Melayu Riau yang ditandai dengan hancurnya kapal komando Belanda "Malaka's Wal Faren". Dan mendesak Belanda untuk mundur dari perairan Riau.

Selang beberapa bulan dari peristiwa tersebut, Raja Haji dan Pasukan Melayu Riau menyerang Malaka sebagai basis Pertahanan Belanda di Selat Malaka. Tetapi dalam peperangan di Malaka tersebut Pasukan Riau mengalami kekalahan dan Raja Haji sebagai komando perang Wafat (ANRI, Kempen K 510805 EE 38). Atas perjuangan beliau, Raja Haji kemudian dikenal sebagai Pahlawan Nasional.

Pada tanggal 1 Nopember 1784, terjadi penandatanganan Kontrak antara Belanda yang diwakili oleh J.P. van Braam dan Sultan Mahmoet dari Riau (ANRI, Riau 70/1a). Perjanjian ini menetapkan Belanda mulai berkuasa di Riau (ANRI: Laporan Politik, 1971, hal 30).

Kemunduran kerajaan Melayu Riau semakin jelas sejak adanya Traktat London 1824 yang merupakan perjanjian tentang pembagian kekuasaan di Perairan Selat Malaka, dimana wilayah Riau-Lingga dibawah kekuasaan Belanda, Johor-Pahang dan sebagian wilayah semenanjung dikuasai oleh Inggris. Melalui peristiwa ini pulalah yang memisahkan keutuhan kerajaan Riau-Johor-Pahang-Lingga, dan kemudian Kerajaan ini dikenal dengan sebutan Riau-Lingga, dan Singapura yang kala itu di bawah kerajaan Riau ditukar ganti dengan Bengkulu yang kala itu di bawah kerajaan Inggris (ibid, hal 31).

Pada 1 Juni 1874 sebuah armada pertempuran dari Batavia yang berkekuatan 6 kapal, 326 meriam dan 2130 prajuritnya berhasil memecahkan blokade Bugis atas Malaka. Pertempuran ini telah menewaskan pimpinan tertinggi Bangsa Bugis yaitu Raja Haji yang telah berhasil mengumpulkan kekuatan diantara bangsa Bugis sendiri dan

Melayu dalam usahanya mengusir Belanda atas pendudukan Malaka (ANRI, Riouw 223/10).

Setelah dikuasai Belanda, Tanjungpinang dijadikan sebagai Pangkalan Militer. Selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi pusat pemerintahan dari *Residentie Riouw en Onderhorigheden* yang meliputi *Afdeeling Riouw Archipel* dan *Afdeeling Inderagiri*, dengan residen pertamanya David Ruhde (Suwondo, 1979: hal 157).

Sejak Belanda menguasai wilayah Kerajaan Riau dan campur tangannya dalam kerajaan, membuat Kerajaan Riau mengalami kemunduran, hingga puncaknya pasca Perjanjian Belanda-Riau 1911, dimana akibat perjanjian itu Belanda menguasai seluruh wilayah Riau. Berkaitan dengan perjanjian tersebut Sultan Riau hanya sebagai peminjam termasuk wilayah tambang timah Pulau Singkep. Pasal terakhir inilah yang ditentang oleh Sultan Riau (Suwondo, 1979, hal 153). Hal tersebut berujung pada pemecatan Sultan Riau oleh Belanda pada tahun 1912. Sultan kala itu tidak mau menandatangani Surat pemberhentian tersebut dan lebih memilih untuk pindah ke Singapura. Sejak saat itu berakhirlah Kesultanan Riau-Lingga dengan dihapuskannya wilayah Riau-Lingga dari peta Keresidenan Belanda (Suwondo, 1979, hal 154). Sementara Keberadaan Tanjungpinang tetap menjadi daerah pusat Keresidenan *Riouw en Onderhedingen* (ANRI, BG BOW No. 7670). Hingga tahun 1942, *Afdeeling* Tanjungpinang terdiri dari *onderafdeeling Tanjungpinang*, Karimun, Lingga, dan Pulau Tujuh.

Pada 1942-1945 keberadaan Belanda digantikan oleh Jepang. Saat itu daerah di Kepulauan Riau menjadi bagian *syonanto* yang terdiri dari to (bekas *controleur*) yaitu Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Dabo singkep, dan Tarempa. Sedangkan pejabat Residen dipegang oleh G. Yagi (eks anggota Pasukan Korps Elite Tentara Kuantung). Pada masanya G. Yagi mencegah usaha romusha untuk masyarakat Kepulauan Riau karena seimbangnya jumlah penduduk pribumi dan Cina. Mereka hanya sebagian saja yang ikut Heiho dan Gyugun (Suwondi, 1979: hal 191).

2. MASA REPUBLIK INDONESIA

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pemerintah Pusat hanya berjalan di tiga kabupaten di Keresidenan Riau, yaitu Pekanbaru, Bengkalis dan Inderagiri. Hal ini karena Kepulauan Riau termasuk Tanjungpinang sudah diduduki oleh Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, terjadi serah terima daerah pendudukan kepada Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 maka keresidenan dihapuskan diganti kabupaten. Bekas keresidenan Riau dibagi menjadi 4 Kabupaten, yaitu Kampar, Bengkalis, Inderagiri, dan Kepulauan Riau yang beribukota di Tanjungpinang (Suwondo, 1979: hal 237). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1949, bekas keresidenan Riau masuk dalam wilayah provinsi Sumatera Tengah, dengan ibukotanya di Bukittinggi (ANRI, Sekretaris Negara No. 0177).

Pada tahun 1957, berdasarkan Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957 dibentuk Provinsi Riau dengan ibukotanya Tanjungpinang, yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, dengan Gubernur pertamanya Mr. S.M.Amin (ANRI, Kempen Sumut 580906), namun tahun 1960 ibukota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru.

Setelah lama menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau, kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1983 tanggal 18 Oktober 1983, Tanjungpinang ditetapkan sebagai Kota Administratif. Setelah menjadi Kota Administratif - Kabupaten Kepulauan Riau hingga tahun 2000, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2001, pada tanggal 21 Juni 2001, statusnya naik menjadi Kota Tanjungpinang. Pusat pemerintahan yang semula berada di pusat Kota Tanjungpinang di pemukiman padat penduduk kemudian dipindahkan ke Senggarang (bagian utara kota) sebagai pusat pemerintahan. Hal ini ditujukan untuk mengimbangi kesenjangan pembangunan dan kepadatan penduduk yang selama ini berpusat di Kota Lama (bagian barat kota).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang ditetapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus momentum untuk kebangkitan Kota Tanjungpinang, setelah meredup dengan pemindahan ibukota Provinsi Riau ke Pekanbaru tahun 1960 dan adanya penetapan Kota Batam sebagai Free Trade Zone.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arsip Nasional RI (1971). *Laporan Politik 1937*, Djakarta: Penerbitan Naskah Sumber ANRI.

Basri, Hasan. (1985). *Menegakkan Merah Putih di Riau*, Pekanbaru: YMSI Riau.

Encyclopedie van Nederlandsch Indie, Leiden : EJ Brill

Historische Geografische Woordenboek, Leiden: DN van Goor.

Nasution, A.H. (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid II*. Bandung: Angkasa.

Poesponegoro, Marwati D. dan Nugroho Notosusanto (2007). *Sejarah Nasional Indonesia I Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka

Suwondo, Bambang (1984). *Sejarah Daerah Riau*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara (1992). *Profil Provinsi Republik Indonesia: Riau*. Jakarta: Yayasan Bhakti Nusantara

SITUS WEB

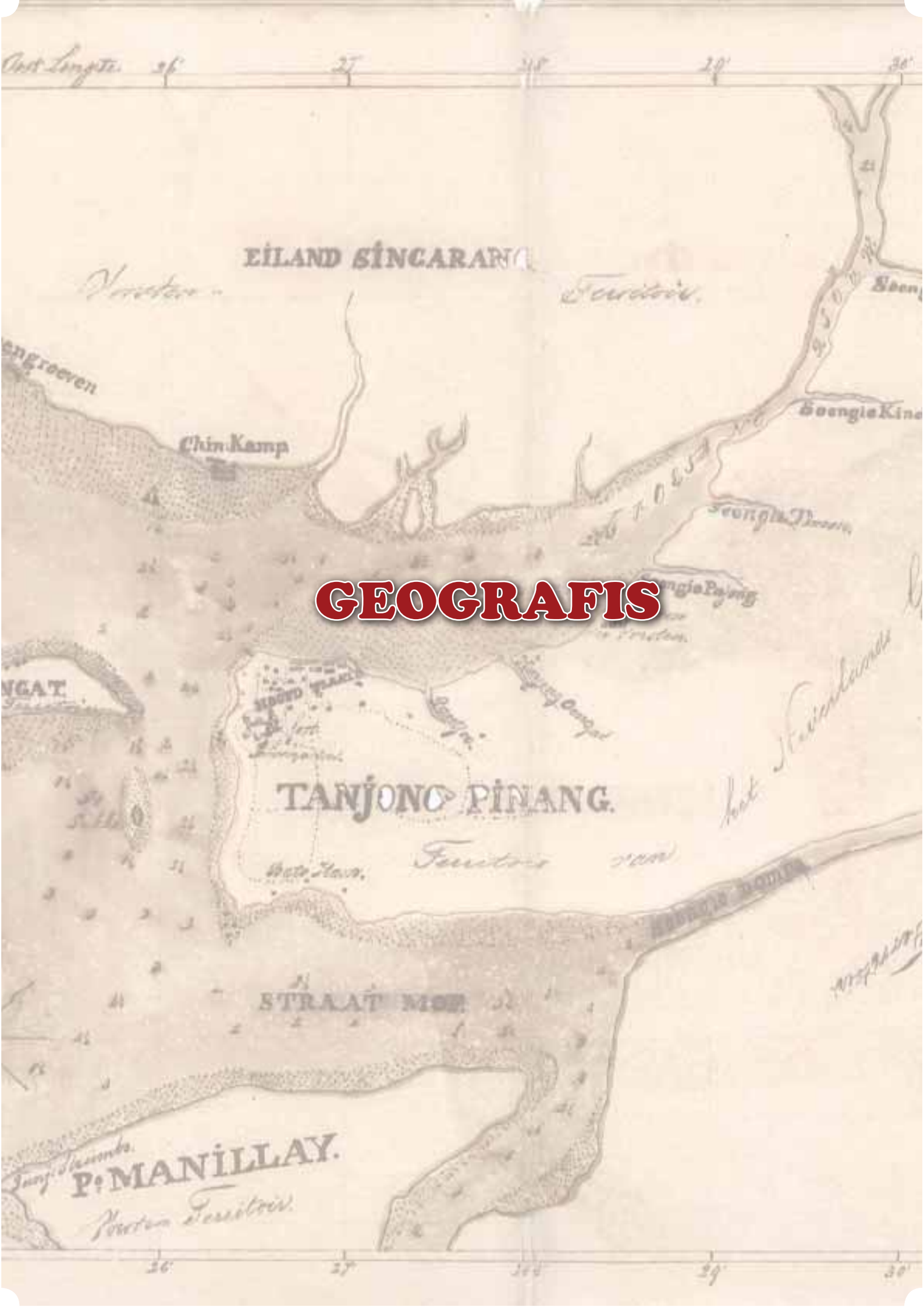
www.kepriprov.go.id

www.tanjungpinangkota.go.id

SITUATIE
VAN DE HOOFDPLAATS
TANDJONG PINANG
SCHAAL-1:2000

**CITRA
KOTA TANJUNGPINANG
DALAM ARSIP**

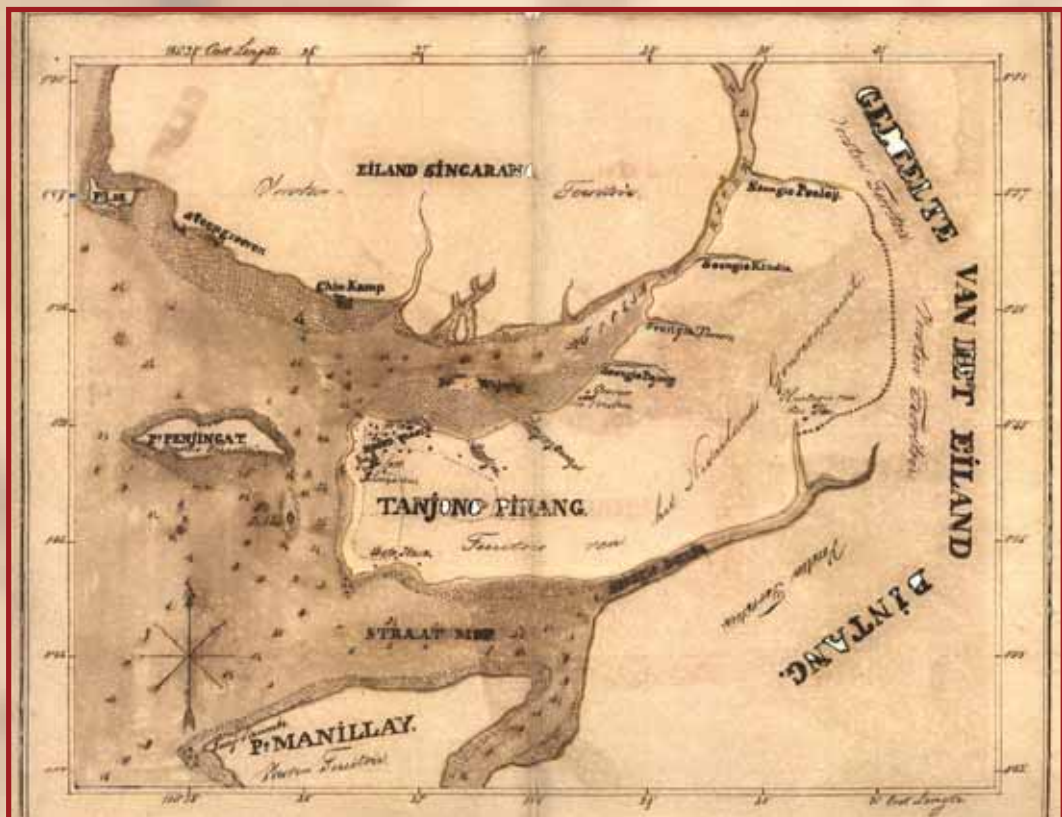
Letter	Number	Street Name
A	1	...
A	2	...
A	3	...
A	4	...
A	5	...
A	6	...
A	7	...
A	8	...
A	9	...
A	10	...
B	1	...
B	2	...
B	3	...
B	4	...
B	5	...
B	6	...
B	7	...
B	8	...
B	9	...
B	10	...
C	1	...
C	2	...
C	3	...
C	4	...
C	5	...
C	6	...
C	7	...
C	8	...
C	9	...
C	10	...
D	1	...
D	2	...
D	3	...
D	4	...
D	5	...
D	6	...
D	7	...
D	8	...
D	9	...
D	10	...
E	1	...
E	2	...
E	3	...
E	4	...
E	5	...
E	6	...
E	7	...
E	8	...
E	9	...
E	10	...



GEOGRAFIS

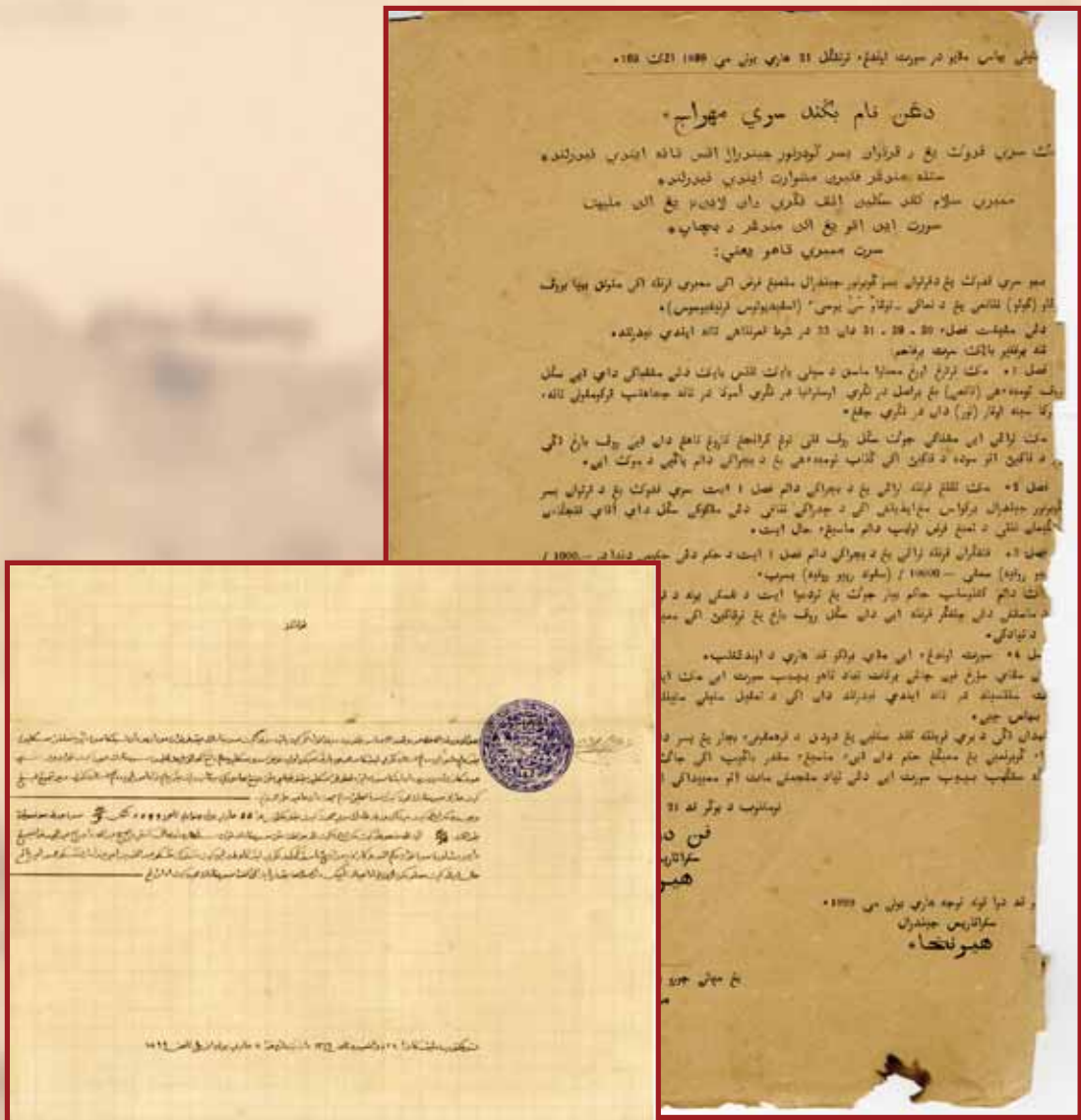
Letak Tanjungpinang pada tahun 1830 termasuk ke dalam wilayah Riau dan Lingga, di mana secara geografis wilayah sebelah utara dibatasi oleh Selat Singapura, menjadi wilayah yang strategis seperti yang tertera pada Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 29 Oktober 1830. Letak geografis Tanjungpinang pun tertuang dalam Surat Perjanjian Penguasa lokal untuk tanah perbatasannya pada tahun 1899. Secara apik terekam peta Ibukota Tanjungpinang pada tahun 1930, lengkap dengan nama-nama wilayahnya.

Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, tahun 1961 Kabupaten Kepulauan Riau dengan Ibukotanya Tanjungpinang, dengan Kawedanan Tanjungpinang yang terdiri dari Kecamatan Bintan Selatan, Bintan Utara, Tambelan dan Batam sebagai wilayah administrasi Propinsi Riau. Baru pada tahun 2014 batas wilayahnya: sebelah utara Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, sebelah selatan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, sebelah barat Kecamatan Galang Kota Batam, dan sebelah timur Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan



Peta Wilayah Riau dan Lingga, termasuk pulau-pulainya diputuskan 29 Oktober 1830. Sebelah Utara dibatasi oleh Selat Singapura, 1830.

Sumber: ANRI, Riau 73-a



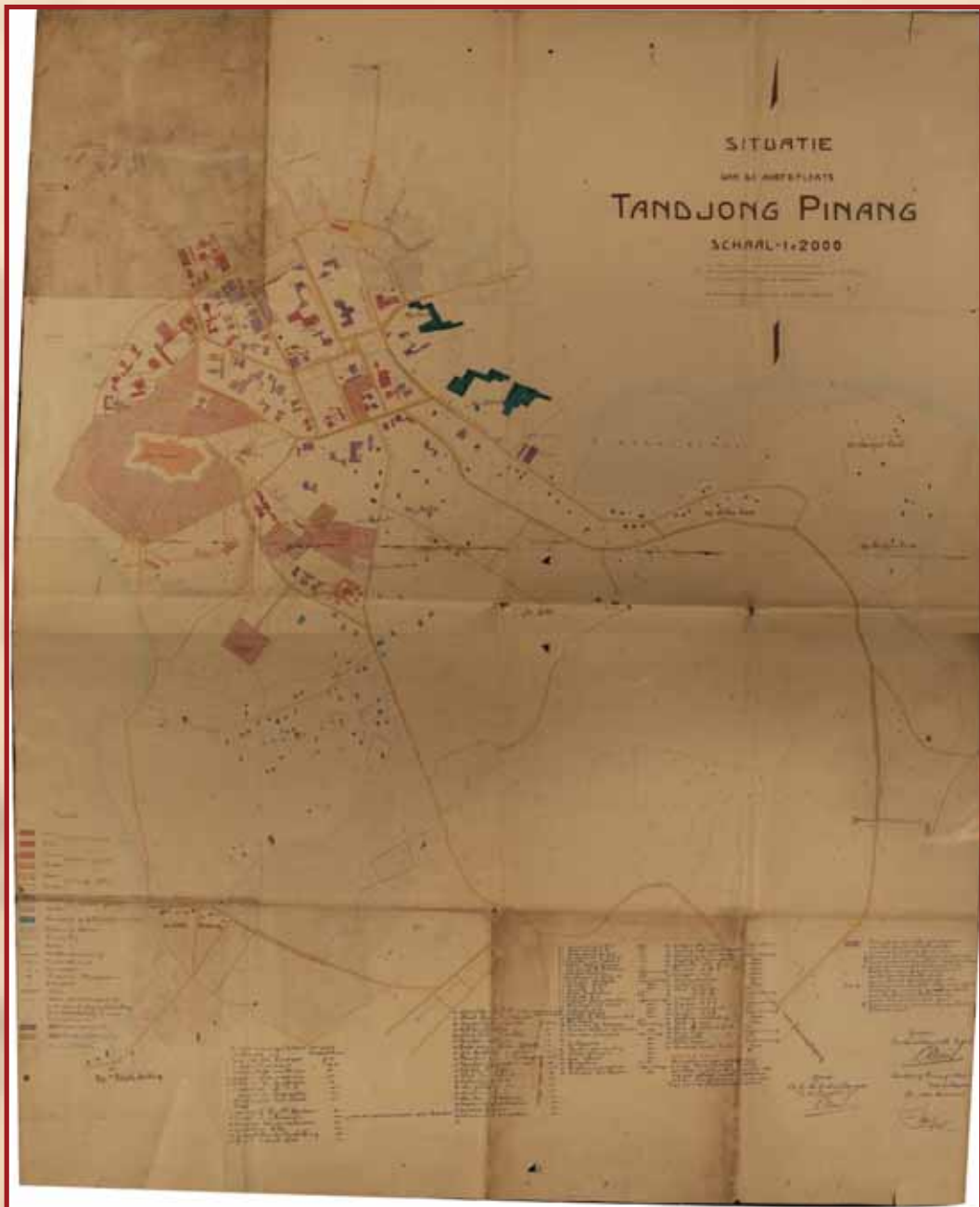
Surat perjanjian mengenai perbatasan tanah Tanjung Pinang, 1899.

Sumber: ANRI, Riouw No. 225.1



Peta Pulau Singkep, Pulau Lingga, Pulau Bintan, Pulau Mendol
(Residensi Riouw Onderhorigheden), 1924.

Sumber: ANRI, Topografi 64-94534-blad1-80



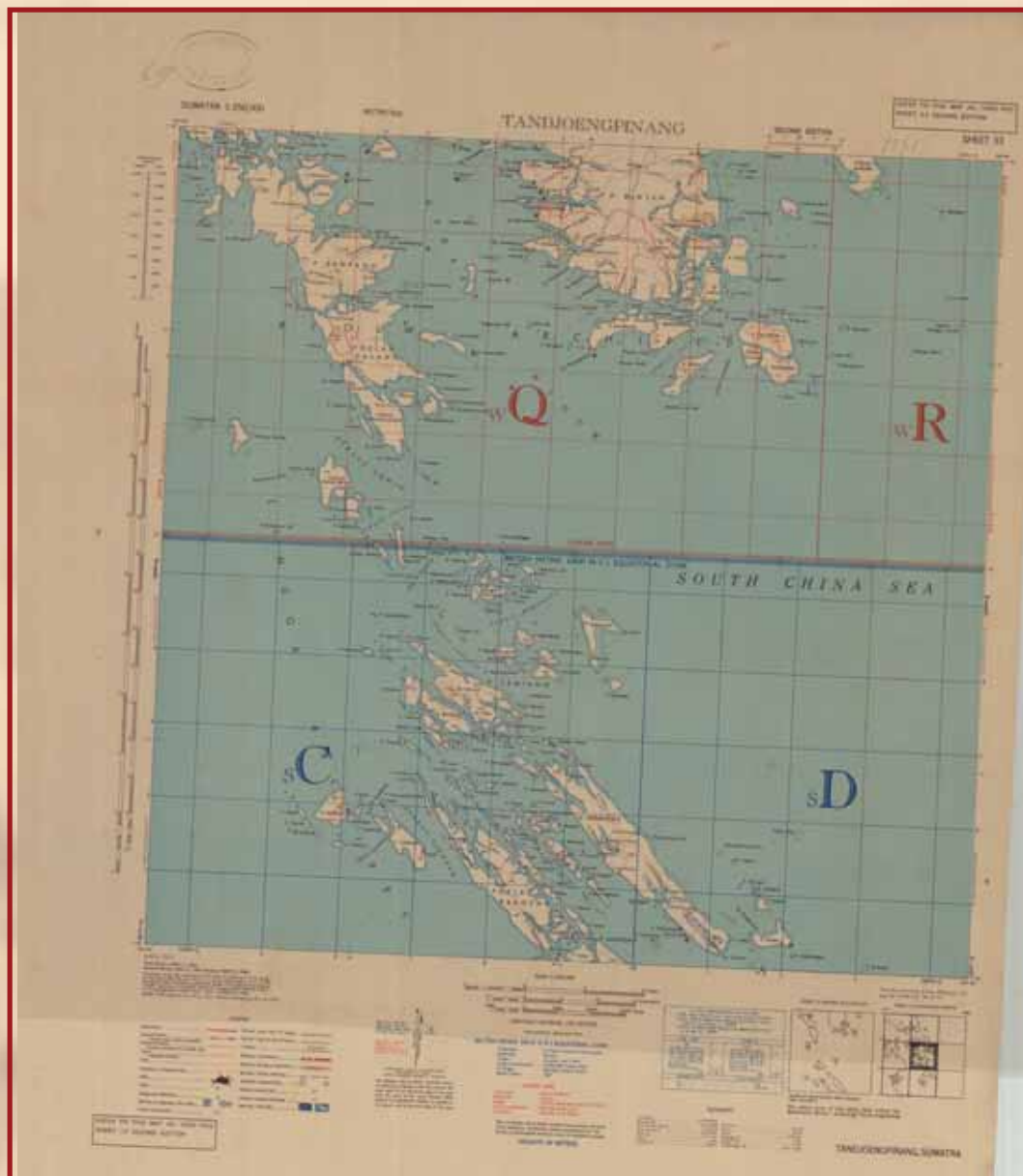
Situasi Peta Ibukota Tandjong Pinang,
1930.

Sumber: ANRI, BG BOW No. 7670



Peta Pulau Singkep, Pulau Lingga, Kepulauan Riouw, Tandjoeng Pinang, Pulau Bintan, Pulau Batam, Tanjung Balai Tambilahan Malaka (Tanjungpinang Sumatera), 1934.

Sumber: ANRI, Topografi 1403/Blad VI/70



Peta Tanjungpinang, Pulau Bintan, Pulau Rempang, Pulau Sedangka, Pulau Tamiang, Kepulauan Riouw (Tanjungpinang), 1944.

Sumber: ANRI, Topografi 1361/Sheet 33/69

D A F T A R pembagian daerah (administrasi)
Propinsi RIAU
(Ibukota PEKANBARU).

Kerami- donan (Ibukota)	Kabupaten (Ibukota)	Kota- pradja	Kewedanan	Ketjamatan	Kete- rangan			
1. Kampar (Bangkinang)			1. Pekanbaru	1. Siak Hulu 2. Langgam 3. Kampar Kiri				
			2. Bangkinang	1. Bangkinang 2. Tiga Belas Koto Kampar 3. Kandang				
			3. Pasirpang- rajan	1. Rumbah 2. Tembusai 3. Kepenuhan 4. Kuntadurusalam 5. Bekan Empat Kota 6. Tadun				
			4. Fallawan	1. Bunut 2. Kuala Kampar 3. Pangkalan Kuras				
			2. Indragiri (Bongat)			1. Indragiri Hilir Utara	1. Tepuling 2. Sembilahan 3. Pateman 4. Osang anak Serka 5. Mandah	
						2. Indragiri Hilir Selatan	1. Kuala Inderagiri 2. Ench 3. Botih	
						3. Indragiri Hulu	1. Bongat 2. Seberida 3. Pasir Penja 4. Varanap	
						4. Kuantan	1. Kuantan Tengah 2. Kuantan Nadik 3. Kuantan Hilir 4. Tjorenti 5. Singingi	
						5. Bengkalis (Bengkalis)	1. Bengkalis 2. Bukit Batu 3. Mandau	
			3. Bengkalis (Bengkalis)			2. Dumai	1. Dumai 2. Papat	
						3. Selatpan- djang	1. Tubingtinggi 2. Merbau	
						4. Bagan Si- api-api	1. Bagan 2. Maba 3. Tanah Putih	
5. Siak Seri Inderapura	1. Siak 2. Sungai Apit							
4. Kepulauan Riau (Tanjungpinang)						1. Tanjung- pinang	1. Bintan Selatan 2. Bintan Utara 3. Tambelan 4. Batam	
			2. Karimun	1. Karim. 2. Kundur 3. Moro Sulit				

Pembagian daerah administrasi Propinsi Riau dengan ibukota Pekanbaru, meliputi 4 Kabupaten, 1 kotapraja, 16 karesidenan, 62 kecamatan, 1961.

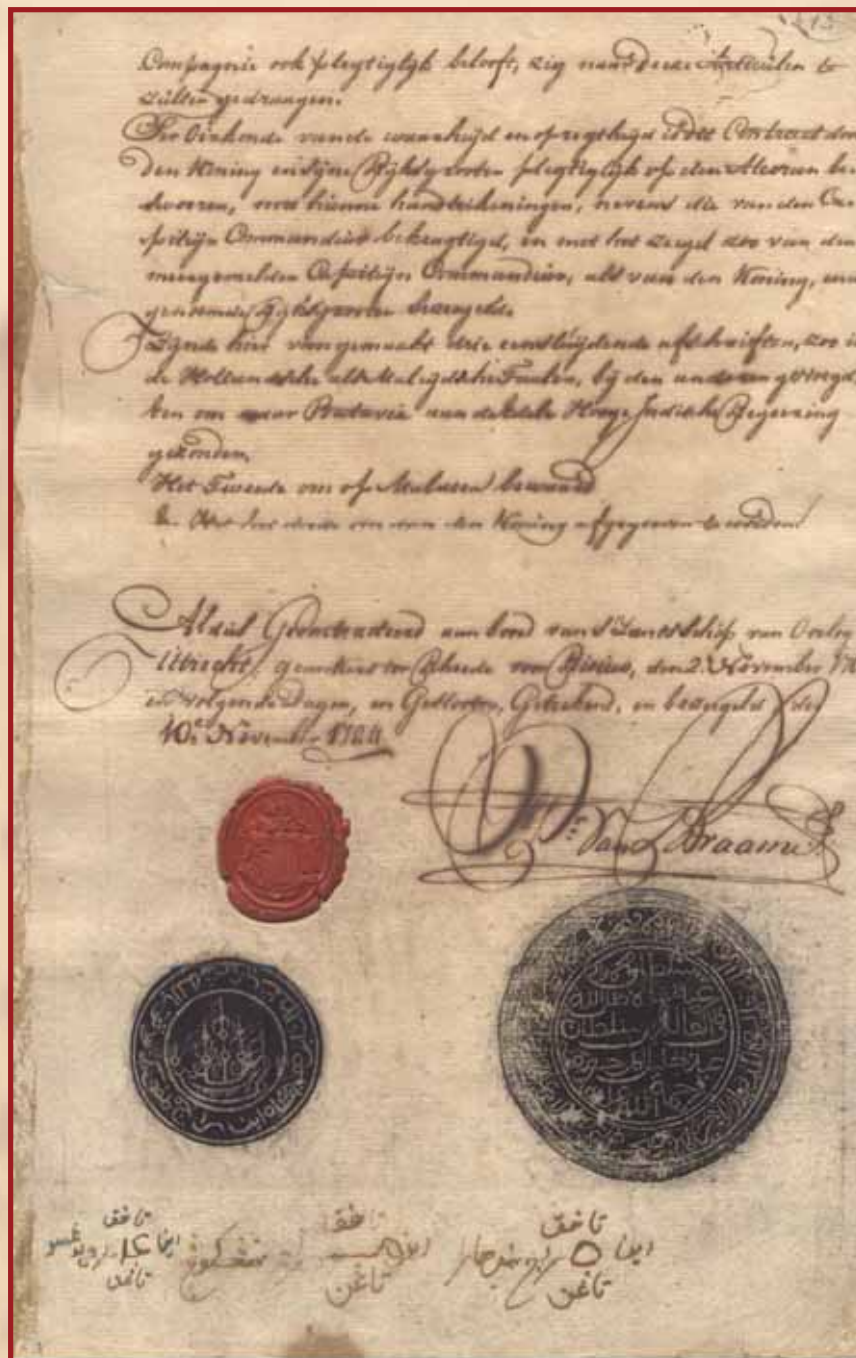
Sumber: ANRI, Marzuki Arifin No. 254



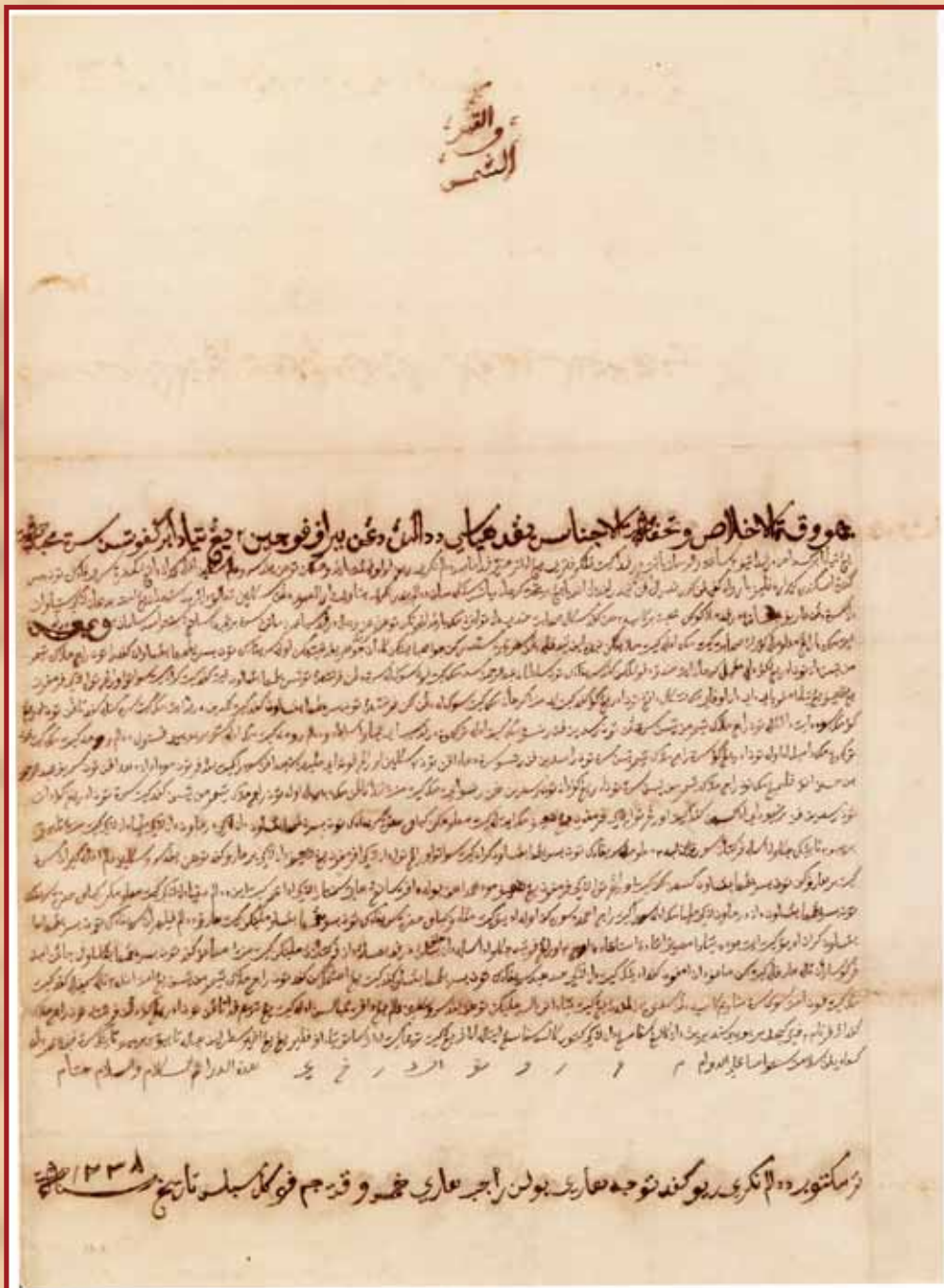
**POLITIK
DAN
PEMERINTAHAN**

Dalam sejarahnya Kerajaan Riau telah berinteraksi dengan Perusahaan Dagang Hindia Timur (Verenigde Oost Indische Compagnie / VOC) di masa-masa akhir kekuasaan VOC, seperti Kontrak pada tanggal 1 November 1784, yang dihadiri oleh Sultan Mahmoet dan J. P. Braam.

Pembahasan pemerintahan sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, telah dibicarakan pada Konferensi Sumatera di Medan tanggal 24 Maret 1945, utusan Dari Riau, Muhammad Afan dan Raja Muhammad. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Tanjungpinang menjadi bagian penting dari Pemerintahan Republik Indonesia, seperti kunjungan-kunjungan Wakil Presiden RI pada tahun 1953 dan 1954. Dinamika pemerintahan pada masa itu sangat beragam, seperti yang dilaporkan tentang adanya rencana Dewan Banteng yang Ingin merebut Kabupaten Kepulauan Riau, Tanjungpinang di tahun 1958. Dilanjutkan dengan kunjungan Presiden RI, Soekarno ke Tanjungpinang pada tanggal 6 September 1959.



Kontrak antara kerajaan Riau dengan VOC 1 Nopember 1784. Masing-masing dihadiri oleh Sultan Mahmoet dan J.P. van Braam
Sumber: ANRI, Riau 70/1a



Surat dari Kesultanan Riau di Pulau Penyengat kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda tentang permohonan pengembalian Kesultanan Johor Yang Timmerman Theisz selaku Penguasa Malaka kepada Sulthan 'Abdurrahman Syah, 1823.
Sumber: ANRI, Surat Emas No. 17

14/4/85

Transcriptie
 Brief van S.H. de Sultan van Lingga
 aan den Resident van Riouw + Ond.
 Deyel & Landrook.
 Brief van de Sultan
 van Lingga.

Riouw $\frac{223}{10}$

85

Genaam bezin.
 Mette adilul hite omi.
 Ancoonkan kepaso p. s.
 gabatal hite dari bel
 perjalanana hite paji.
 ke Lingga beromni gab.
 andu hite s. p. janghi.
 petanua Riouw j. ita
 betolog dari Riouw
 p. Penyingat pada 24th.
 Djacundilakhir hari
 Chasri somba paji
 hari Djacundilakhir
 & Cepas saurpi di Lingga
 dan pantas hite nuib
 ahli. ke Dik. hite
 hite nuib Atarison.
 Sub oleh ier negeri
 Lingga dengan omia.
 pukan kelakuan jing
 omia kemekian. Sa
 te memusat sabagi.
 omia adal pada omi.
 sa saruan perikalo.
 Jahuwa kelakuan
 omia hite ier jing
 hite omia hendeq
 memphambatkan.
 Sub sendiri Atarip
 matjeli diladapa
 ier negeri kemekian
 jaita

Salinan surat Sultan Lingga kepada Residen Riau dan wilayah sekitarnya mengenai laporan perjalanan Sultan Lingga ke Pulau Penjinjat (Pulau Penyangat, Batam),
15 April 1885.

Sumber: ANRI, Riouw 223/10



Stempel onderkoning van Riouw Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf bin Raja Ali, 1890 (1274 H).

Sumber: ANRI, Riouw 223.5



Konferensi Sumatera bertempat di Medan 24 Maret 1945. Tampak utusan dari Riau juga hadir yaitu Muhammad Afan (nantinya menjadi Wali Negara Riau) dan Raja Muhammad. Konferensi ini membahas kepentingan Sumatera dipimpin oleh pemerintah Belanda.

Sumber: ANRI, KIT Sumut 1106/84

Undang² 1949 No. 15

PEMERINTAHAN PROPINSI SUMATRA
TENGAH. Peraturan tentang pembentukan
Propinsi Sumatra Tengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk daerah Propinsi Sumatra Tengah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;

Mengingat: pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 tahun 1948;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Menghapuskan pemerintahan daerah Karesidenan Sumatra Barat, Riau dan Djambi dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;
- II. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatra Tengah dengan peraturan sebagai berikut;

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATRA TENGAH.

BAB I.

Peraturan Umum.

Pasal 1.

Daerah yang meliputi daerah Karesidenan Sumatra Barat, Riau dan Djambi ditetapkan menjadi Propinsi Sumatra Tengah.

Pasal 2.

- (1) Pemerintahan daerah Propinsi Sumatra Tengah berkedudukan di Kota Bukittinggi.
- (2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

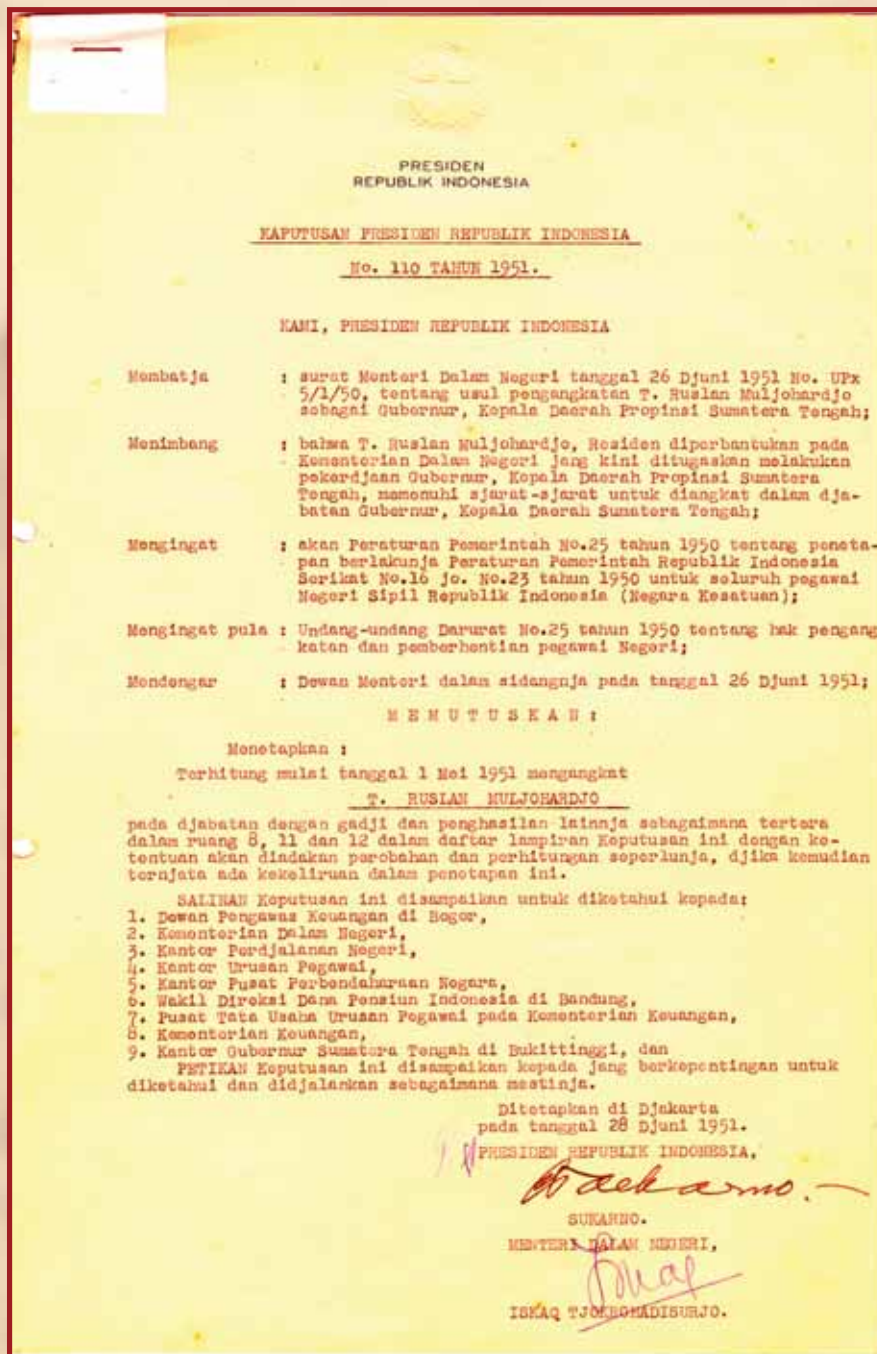
Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Sumatra Tengah terdiri dari 40 orang anggota.
- (2) Djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatra Tengah, ketjuai anggota-Kepala Daerah, adalah 5 orang.

38

Fragmen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1949 tentang pembentukan provinsi Sumatera Tengah, November 1949.

Sumber: ANRI, Sekretaris Negara No. 0177



Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 1951 tentang Penetapan T. Ruslan Murohardjo sebagai Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Tengah, 28 Juni 1951.

Sumber: ANRI, Sekkab Keppres No. 329



Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Asrama Polisi
di Tanjungpinang,
20 April 1953.

Sumber: ANRI, Kempen K 530420 EE 34



Suasana rapat umum pada waktu kunjungan wakil Presiden Mohammad Hatta di Tanjungpinang, 20 April 1953.

Sumber: ANRI, Kempen K 530420 EE 11



Wakil Presiden Mohammad Hatta memakai perahu motor menuju ke Kapal Jadayat di Pantai Tanjungpinang, 16 April 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 540416 EE 9



Wakil Presiden Mohammad Hatta disambut oleh perwira-perwira Angkatan Darat dan Laut saat tiba di Pelabuhan Tanjungpinang, 23 April 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 540423 EE 1

RENTJANA "DEWAN BANTENG" UNTUK
MEREbut KABUPATEN KEP. RIAU TG: PINANG.

Sebagaimana kita ketahui bahwa satu2-nja Kabupaten di daerah Riau yang belum dapat dikuasai oleh Dewan Banteng ialah Kabupaten Kepulauan Riau, yang ibu kotanja Tg: Pinang

Tidak dapat dikuasainja oleh Dewan Banteng daerah Kepulauan ini karena dia terdiri dari pulau2 yang tersebar dilautan Karimata, yang merupakan suatu benteng alam yg membatasi antara beberapa muara Sungai di Sumatera terutama muara2 sungai yang ada di Riau daratan dgn S'pore.

Oleh karena Kepulauan Riau ini tidak dapat dikuasai oleh Dewan Banteng, maka dengan sendirinja Kepulauan inilah satu2-nja Kabupaten di daerah Riau yang tunduk langsung kepada Pemerintah Pusat R.I. dan kebetulan pula Tentara yang menguasai daerah ini ialah ALRI.

Dikarenakan Kepulauan Riau ini satu2-nja Kabupaten yang tunduk kepada Pem. Pusat RI, maka disini pula memberikan kemungkinan yang besar dan terbaik bagi Pem. Pusat RI untuk menjadikan Kepulauan ini suatu "BASIS PERTAHANAN", untuk melancarkan sesuatu taktik dan aksi guna melumpuhkan kekuatan kaum pemberontak yang ada di Sum. Barat itu, baik dari segi operatif Militer maupun dari segi ekonomi.

Karena dari Tanjung Pinang ini sangat sekali mudahnja untuk memblokade kapal2 yang datang dan ke Singapore, dan dari Tanjung Pinang ini sangat mudah menjalarkan bantuan langsung ke daerah Riau daratan, melalui perairan2 yg ada disana.

Letak yang strategis bagi Tanjung Pinang yang dipandang dari jurusan Militer dan economic memang dapat di mengerti dan dirasakan PENTINGNJA oleh Dewan Banteng. Oleh karena itu diakhir2 ini komplotan pemberontak Dewan Banteng berusaha dgn giatnja untuk menjaplok Tg-Pinang dengan melalui berbagai-bagai djalan. Djalan2 yang di tempuh oleh mereka itu ialah:

1. Meinstruksikan kepada Bupati Rakanadalan untuk mendekati Overste ALRI Simandjuntak,
2. Mengirimkan tenaga2 veteran dari Sum. Barat ke Tanjung Pinang sebanyak 300 orang, yang ditempatkan mendjadi petani2 disepanjang djalan antara Tg: Pinang dengan Kidjang. Dan didalam rombongan ini terdapat beberapa orang opsir yang tadinja memang aktif,
3. Mengirimkan "kaki-tanganja" yang menjamar sebagai pedagang antara Indragiri, Pakanbaru dgn Tg: Pinang,

PENDJELASAN:

Tentang hubungan baik antara Overste Simandjuntak dgn Bupati Rakanadalan ini memang tidak usah diragukan lagi, bahkan menurut desas-desus yang ada, Overste Simandjuntak ini sering tidak menjadari melakukan taktik didalam sesuatu tindakan, didektekan oleh pendapat2 yang bersumber dari Bupati Rakanadalan ini. Sehingga dengan itu banjak Kepala2 Djawatan, pemuka2 Rakyat, bahkan Residen Mr. Sis Tjakraningrat sendiri memaruh suatu ketjurigaaan kepada Overste Simandjuntak ini selaku Komando Maritiem Daerah Riau.

Apalagi setelah ada suatu bisikan yang amat rahasia sekali yang mengatakan bahwa Overste Simandjuntak ini telah pernah berbitjara "EMPAT MATA" dengan

Laporan M. Zain Busrie tentang rencana Dewan Banteng untuk merebut Kabupaten Kepulauan Riau, Tanjungpinang, 19 Februari 1958.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI No. 2123



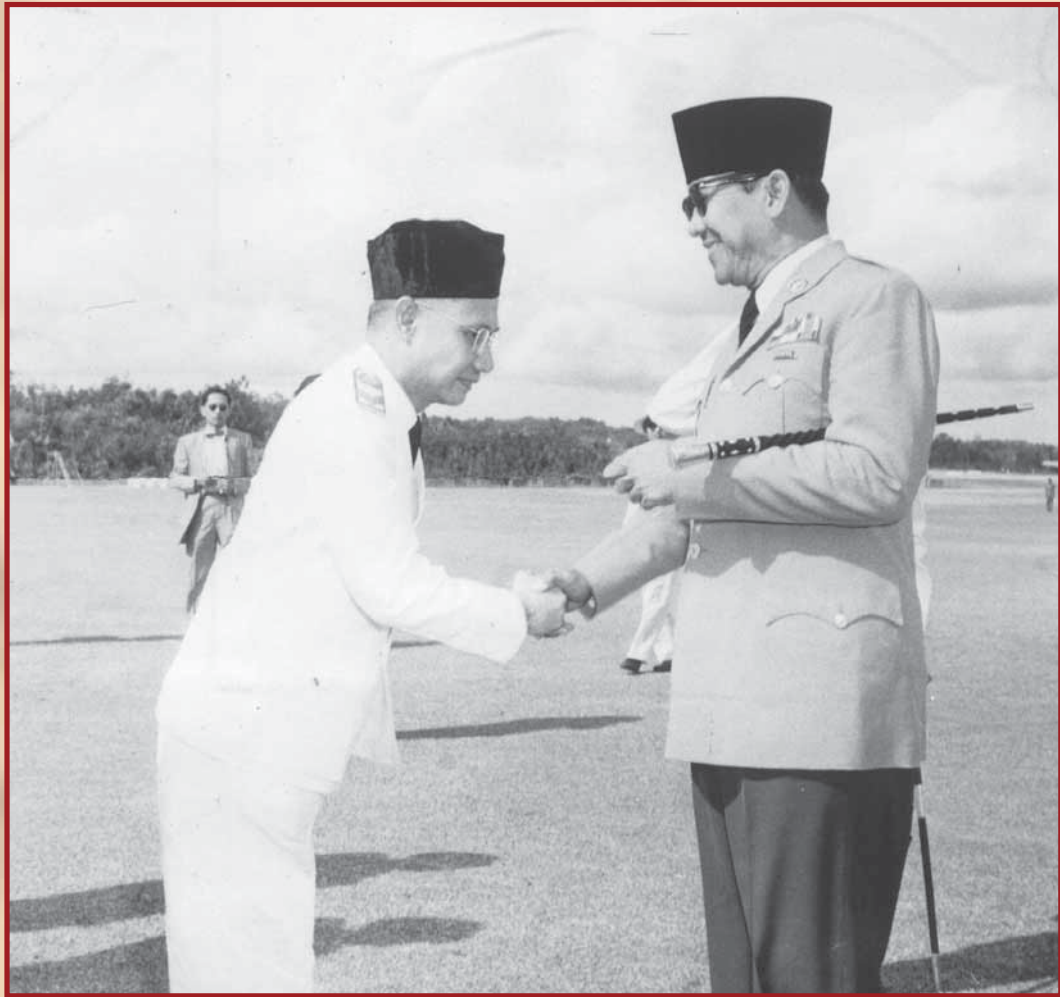
Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan
setibanya di lapangan terbang di Tanjungpinang,
6 September 1959.

Sumber: ANRI, Kempen 02/C/4-59



Presiden Soekarno menerima Sumpah Pelajar dari seorang pelajar di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 6 September 1959.

Sumber: ANRI, Kempen K 590906 EE 2-1



Gubernur Riau menyambut kunjungan Presiden Soekarno
di Tanjungpinang, 1959.

Sumber: ANRI, Kempen Sumut 590906 EE 1-7

PIDATO P.J.M. PRESIDEN PADA RAPAT RAKSASA DI
TANJUNGPINANG PADA TANGGAL 6 SEPTEMBER 1959.

---Mk---



Saudara-Saudara, anak-anak sekalian, Assalamualaekum Warahmatulahi
Wabarakatuh! Merdeka!

Inshallah Saudara-Saudara dan anak-anak sekalian, Bapak beberapa saat yang lalu dengan selamat telah sampai dikalangan Saudara-Saudara. Bapak datang dari daerah Atjeh dan di Atjeh ternjata bahwa rakjat Atjeh, meskipun mendapat matjam-matjam gangguan yang tidak baik karena adanya pemimpin-pemimpin yang tidak baik, sekarang ternjata rakjat Atjeh semangatnja berkobar-kobar, menjala-njala, setia kepada proklamasi, setia kepada tjita-tjita kita yang semula, setia kepada tudjuan revolusi nasional kita. Bapak dapat menjaksikan hal itu.

Ja memang tadija ada orang-orang yang berkata bahwa di beberapa daerah ini rakjat-djelatanja njeleweng; dikatakan bahwa rakjat daerah Atjeh njeleweng, Sulawesi njeleweng, lain-lain tempat njeleweng, tetapi ternjata tidak demikian Saudara-Saudara. Ternjata bahwa rakjat djelata, -- dengankan perkataan Bapak--, rakjat djelata, rakjat marhaen, rakjat biasa, dimana-mana baik-baik, tetap setia kepada revolusi nasional kita. Rakjat Atjeh demikian pula, yang njeleweng itu bukan rakjatnja Saudara-Saudara, pemimpin-pemimpin bedjat itu yang njeleweng. Dan pemimpin-pemimpin bedjat ini Saudara-Saudara, kadang-kadang dapat menarik sebagian ketjil daripada rakjat djelata itu. Tetapi pada dasarnya rakjat djelata, rakjat Indonesia yang 88 djuta djumlahnja tetap baik, tetap setia kepada proklamasi, tetap setia kepada tjita-tjita revolusi nasional kita.

Saudara-Saudara tau apa tjita-tjita revolusi nasional kita? Tjita-tjita revolusi nasional kita ialah dua, ada yang politik, tjita-tjita politik.....

Ja saja akan berhenti satu menit. Minta ini, semun sembojan-sembojan digulung. Digulung, atau ditutup, biar orang-orang dibelakang tidak berteriak-teriak; sesudah digulung, diturunkan. Sesudah digulung, diturunkan.

Saudara-Saudara saja ulangi. Tjita-tjita revolusi kita adalah dua. Tjita-tjita politik dan tjita-tjita sosial. Apa tjita-tjita kita? Tjita-tjita politik kita ialah membangun suatu negara yang besar yang berbentuk republik kesatuan. Bukan dua, bukan tiga negara, tetapi satu negara besar, berbentuk republik kesatuan, berwilayah kekuasaan antara Sabang dan Merauke. Itu adalah tjita-tjita politik kita. Dan tjita-tjita politik kita itu belum terpenuhi 100%, oleh karena Irian Barat masih didjajah oleh pihak Belanda. Maka oleh karena itu segenap rakjat Indonesia, segenap rakjat Indonesia harus menjusun revolusi Nasional kita agar supaya Irian Barat masuk wilayah kekuasaan Republik.

Tjita2

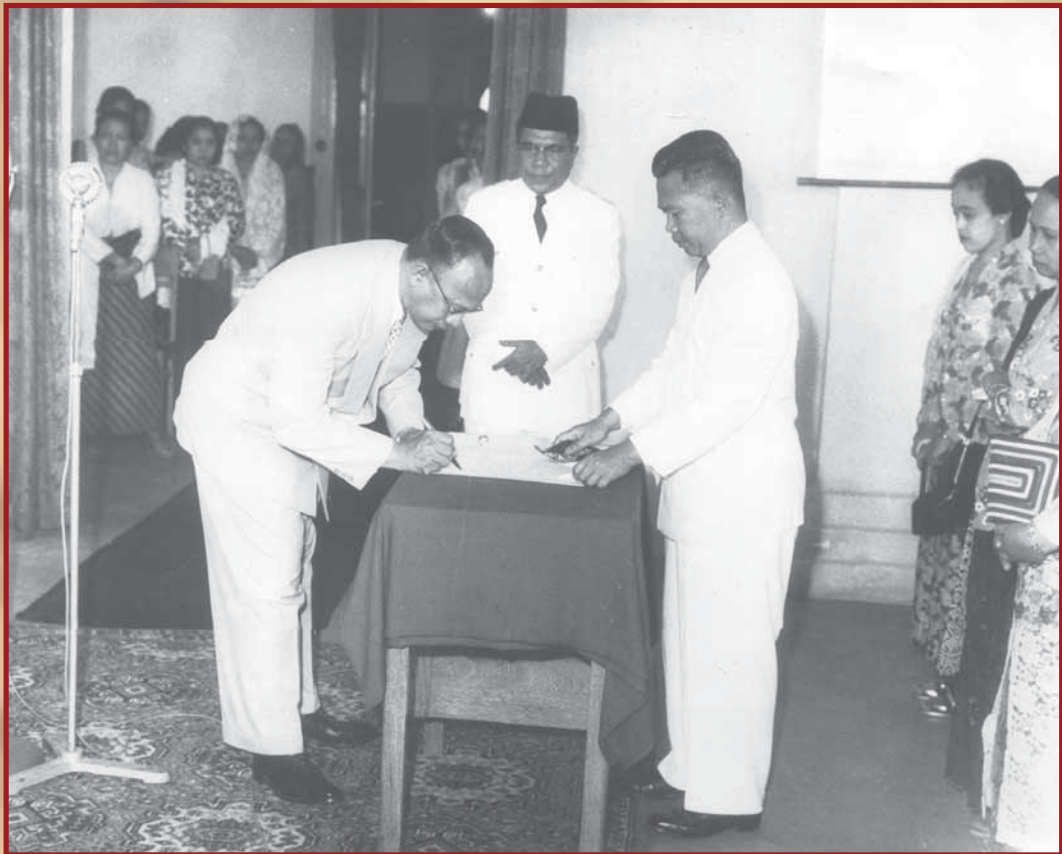
Pidato P.J.M Presiden pada rapat raksasa di Tanjungpinang,
6 September 1959.

Sumber: ANRI, Pidato Presiden No. 110



Foto bersama Presiden Soekarno beserta Ibu Hartini dan para pembesar Riau beserta Nyonya di ruang utama Gubernur Riau di Tanjungpinang, dalam suatu acara kunjungan Presiden ke Riau, 1959.

Sumber: ANRI, Kempen Sumut 590906 EE 12



Pelantikan Mr. S.M. Amin sebagai Kepala Daerah Sumatera Tk. I
Riau di Tanjungpinang
Sumber: ANRI, Kempen Sumatera Utara



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Riau pada umumnya, dan Kabupaten Kepulauan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Tanjung Pinang Kabupaten Kepulauan Riau, meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Riau, perlu membentuk Kota Tanjung Pinang sebagai daerah otonom;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Tanjung Pinang untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang

Undang-Undang Republik Indonesia tentang
pembentukan Kota Tanjungpinang,
21 Juni 2001.

*Sumber: ANRI, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5
Tahun 2001*



PENDIDIKAN

Kemajuan perkembangan pendidikan di Kota Tanjungpinang menjadi sangat penting, di masa awal Kemerdekaan RI, Tahun 1953, dalam suatu kesempatan Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta melakukan kunjungan baik ke Madrasah maupun Taman Kanak-kanak di Tanjungpinang.

Pembangunan Sekolah Teknik Pertama Bagian Perkapalan pada tahun 1954 membuktikan pentingnya pembangunan pendidikan di Tanjungpinang.



Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan mengunjungi Madrasah Nurul Islam di Tarempa, Tanjungpinang, 20 April 1953.

Sumber: ANRI, Kempen K 530420 EE 61



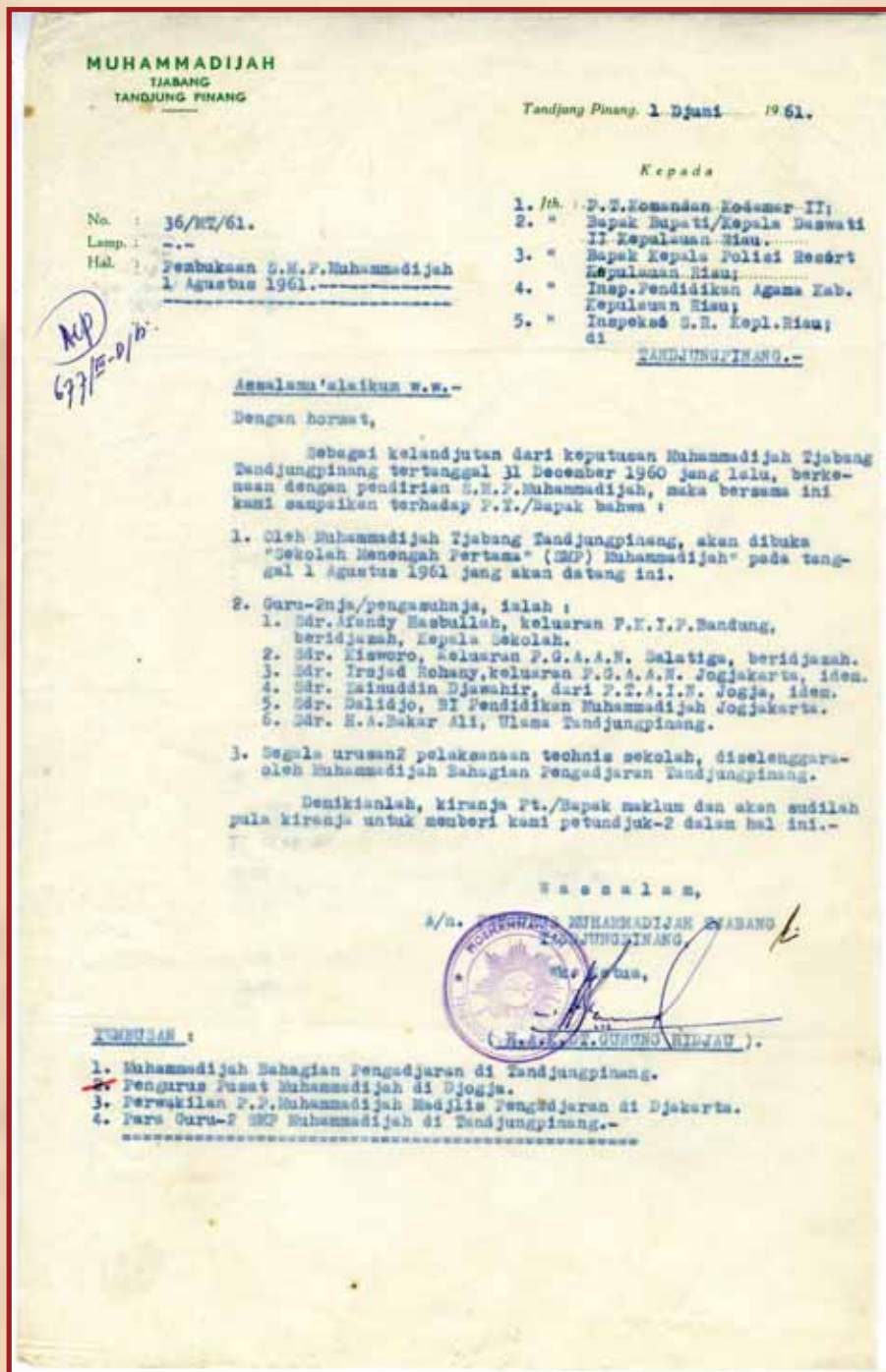
Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Sekolah
Taman Kanak-kanak di Tarempa, Tanjungpinang,
20 April 1953.

Sumber: ANRI, Kempen 530420 EE 75



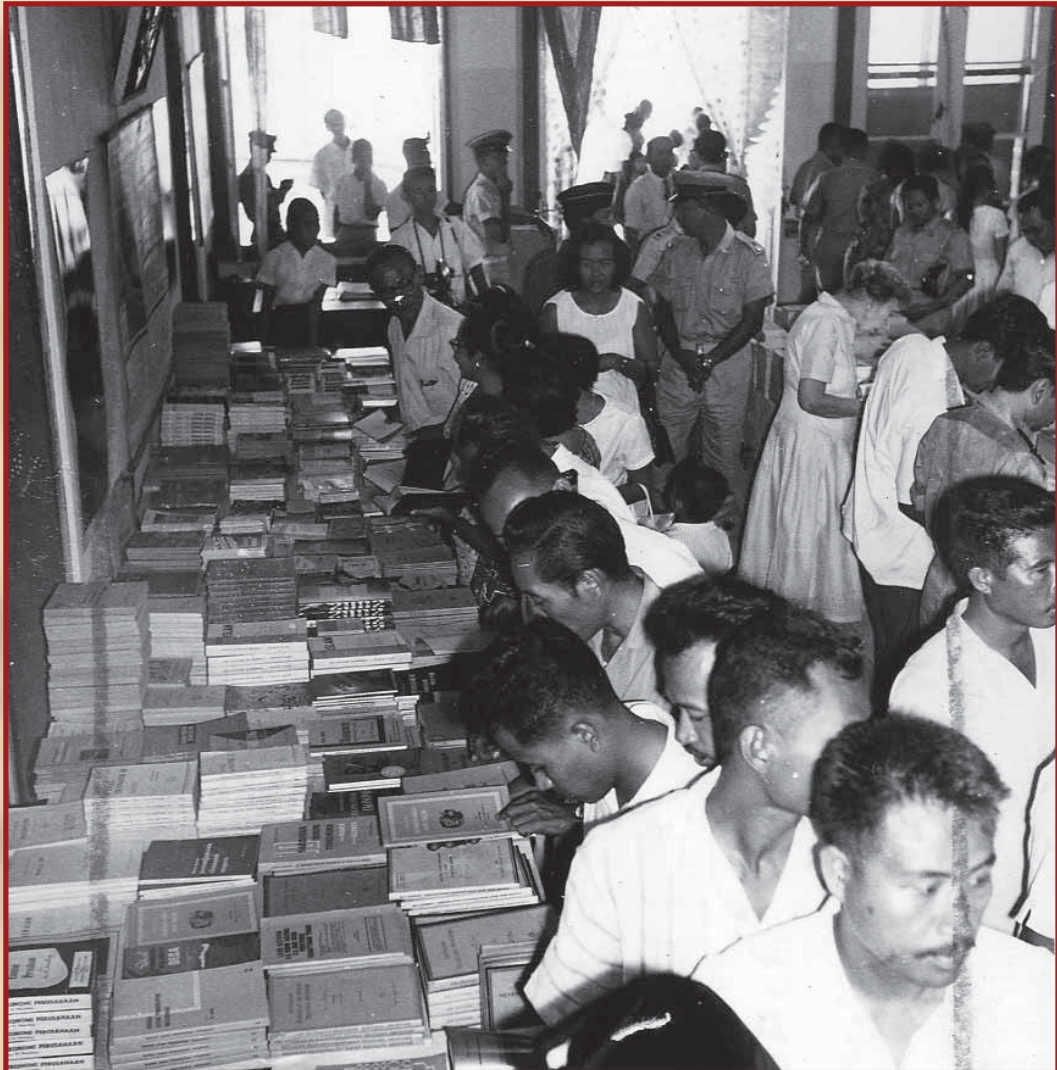
Gedung Sekolah Teknik Pertama Bagian Perkapalan
di Tanjungpinang, Kepulauan Riau
18 Maret 1954.

Sumber: ANRI, Kempen Ia



Surat mengenai pembukaan SMP Muhammadiyah
Cabang Tanjungpinang, 1961.

Sumber: ANRI, Muhammadiyah No. 3661



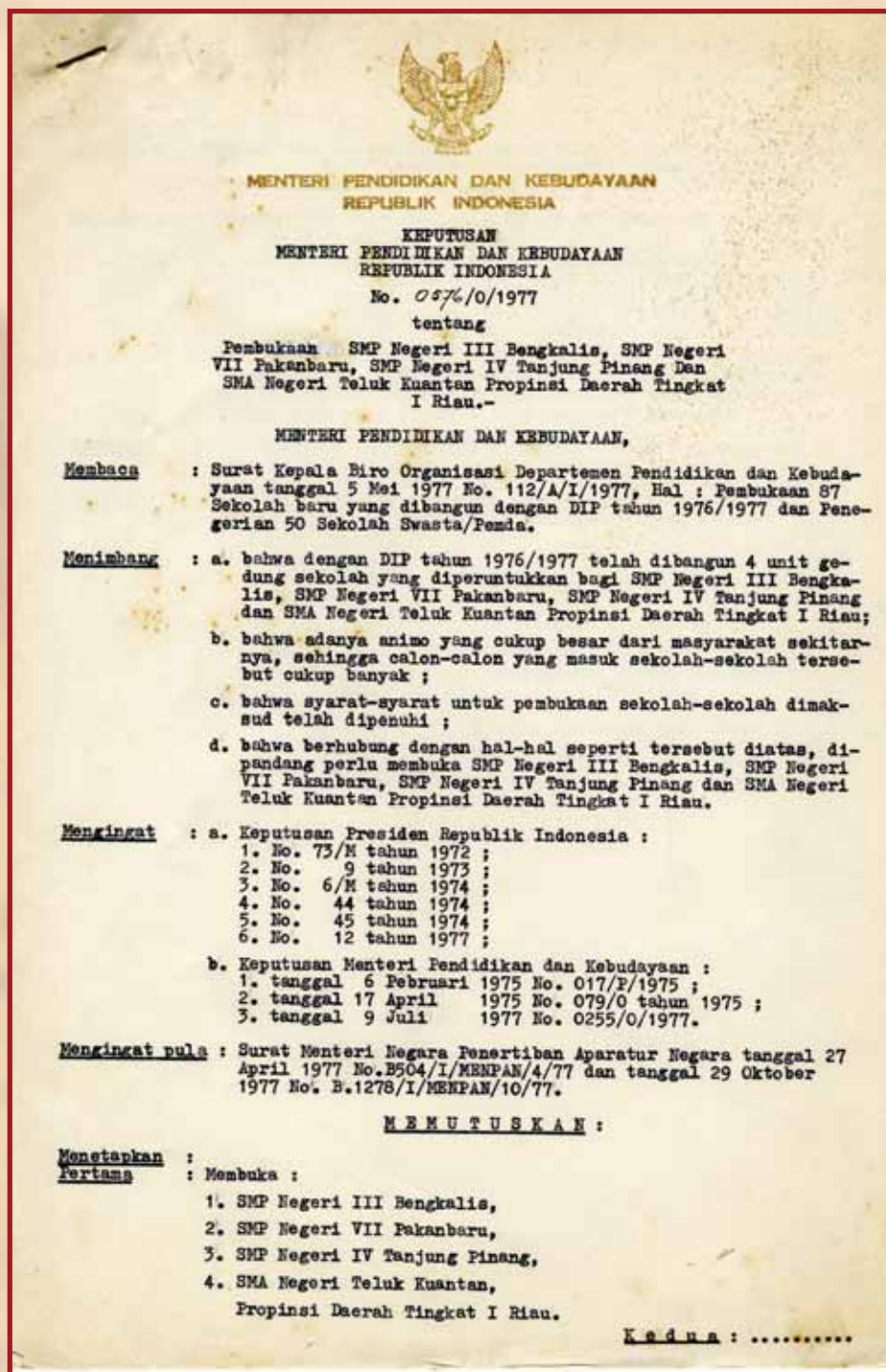
Suasana pameran buku dengan para pengunjung
di Tanjungpinang, Kepulauan Riau,
20 Januari 1964.

Sumber: ANRI, Kempen 64-812



Penerima tamu berpakaian daerah saat pameran buku di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 20 Januari 1964.

Sumber: ANRI, Kempen 64-848



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0576/o/1977 tentang pembukaan SMP Negeri III Bengkalis, SMP Negeri VII Pekanbaru, SMP Negeri IV Tanjung Pinang dan SMA Negeri Teluk Kuantan Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 8 Desember 1977.

Sumber: ANRI, Kepmendiknas Nomor: 0576/o/1977



PEREKONOMIAN

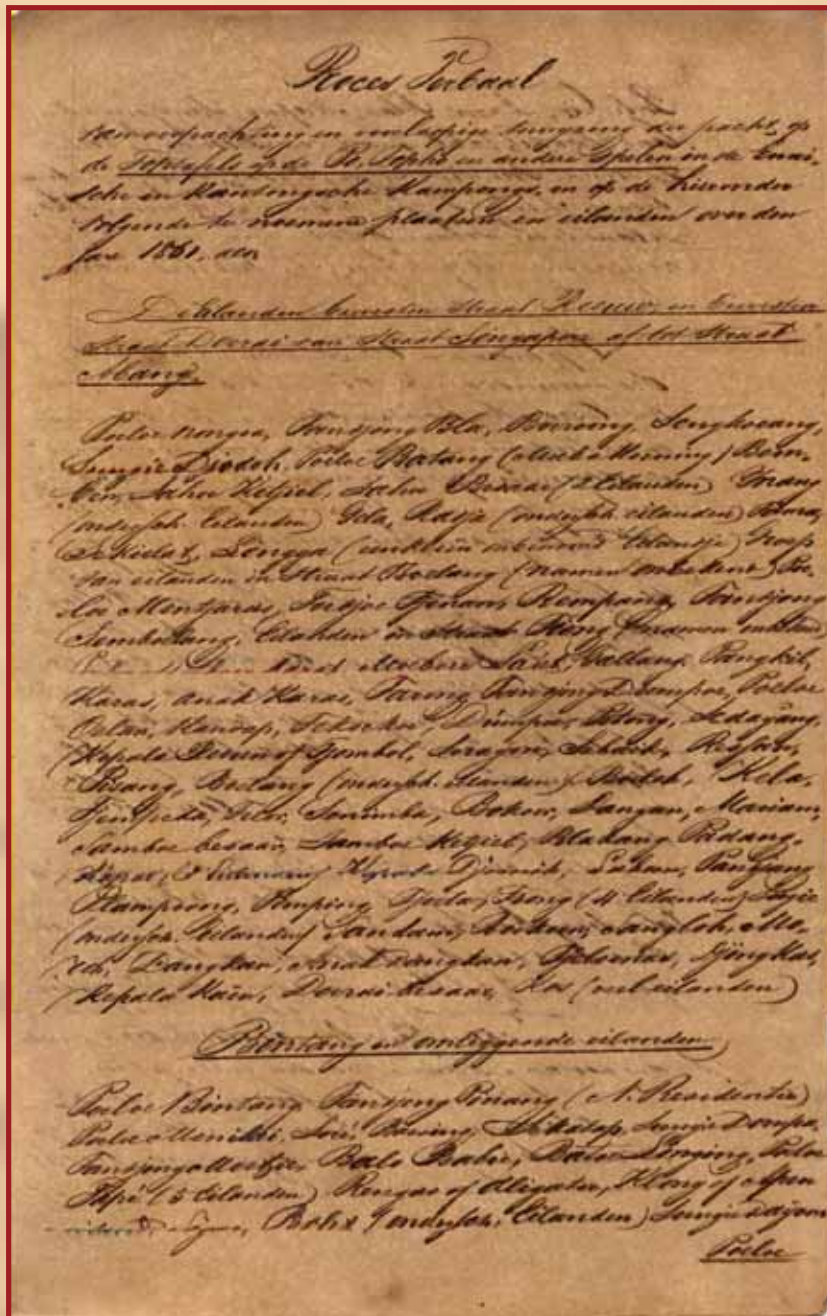


Posisi yang strategis Kota Tanjungpinang di Pulau Bintan menjadikannya sebagai bagian dari lalulintas perdagangan Kerajaan Riau dengan negeri sekitarnya pada abad ke 17, kehidupan perekonomian Tanjungpinang pun berkembang. Gedung lelang yang telah dimulai perencanaan pembangunannya pada tahun 1656 menandakan akan kehidupan perekonomiannya yang modern. Pemberlakuan pajak pendapatan atas hasil bumi pada masa pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1861, juga membuktikan kehidupan perekonomian Tanjungpinang yang berkembang pesat.

200	Batang kayu belah panjang 30 kaki	1 = 16.	3200
80	Trang batu & bahan	11 ¹ / ₂ = 24.	1920
100	Batu-batu	10 = 36.	3600
1200	Kilfil	10 = 15.	1800
600	potong papan tebal	10 = 10.	6000
1500	siapi	10 = 6.	9000
10000	Atap	10 = 2.	2000
5	Leukol paku Kilfil dan bahan	1 ¹ / ₂ = 21.	105
7	deraji engsel pintu dan tingkap	1 = 6.	42
7	slot besi	1 = 3.	21
2	deraji slot kilfil paku dan pintu dan tingkap	1 = 21.	42
	Slotan		50
	Kepa duri' looking amara' diti' amir' takl		1200
	Epilla amara' f 2646		
320	Kalita batu inggang bahan gila 1 kalita 10 kalita f		64
10000	potong batu mesah	1000 = 2.	20000
5	Kinjang Kalk	1 kinjang 4/12	180 96
20	lampau paku	1 lampau 2/12	30
			300 96

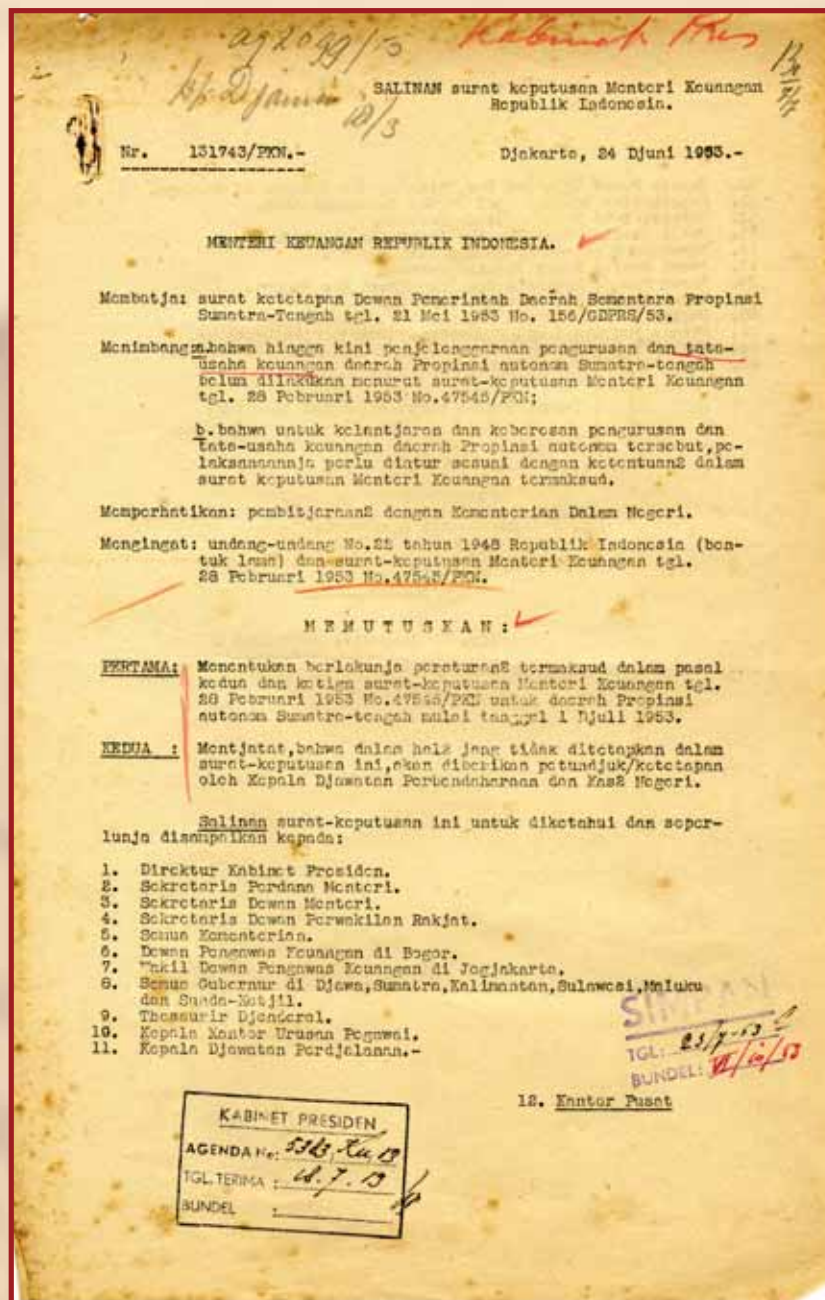
Permohonan biaya gedung lelang di Teluk Tanjungpinang Barat, beserta gambar dan rincian biaya, 1656.

Sumber: ANRI, Riau 97/a



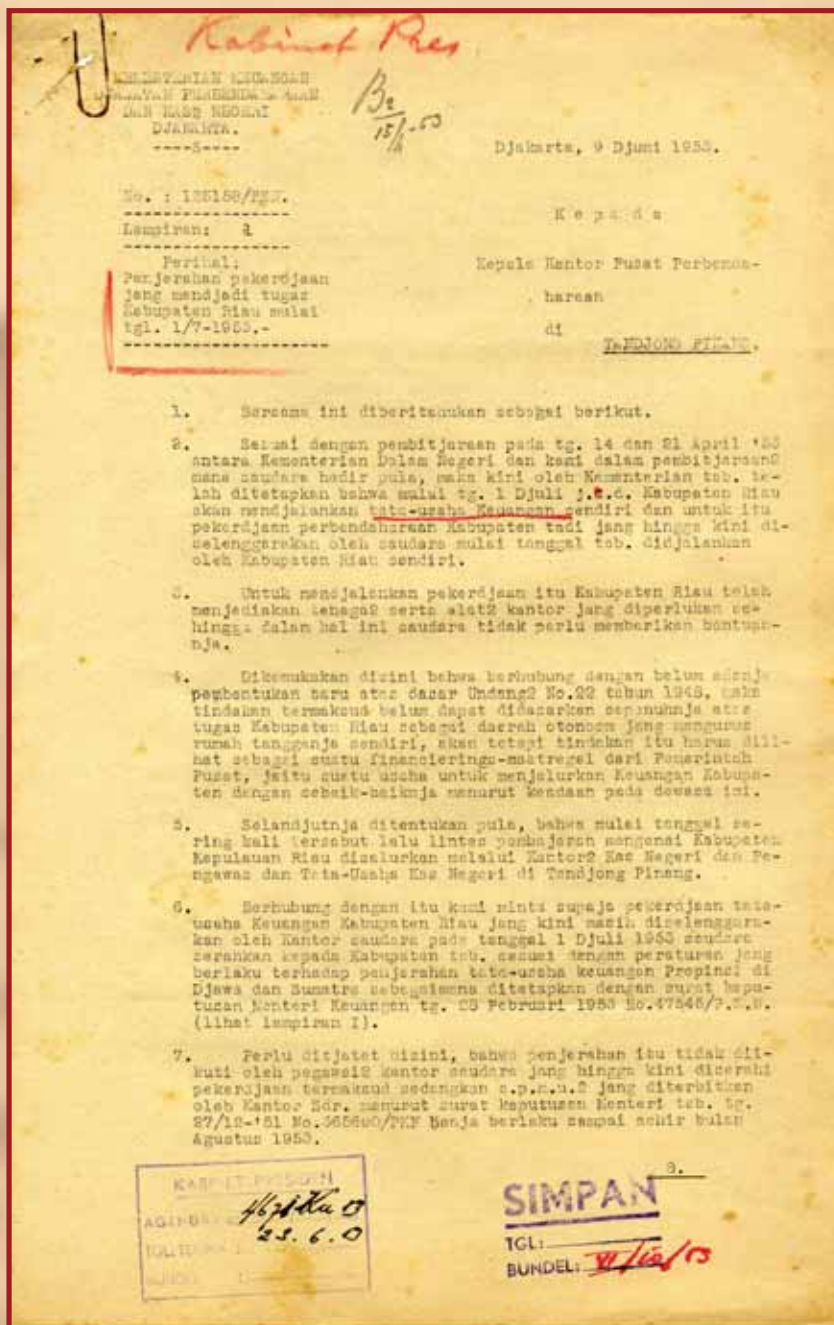
Batas daerah-daerah di kerajaan Riau yang harus membayar pajak pendapatan seperti lada hitam/ putih, tontonan rakyat, candu, babi, arak, dll, 1861.

Sumber: ANRI, Riouw No. 215.3



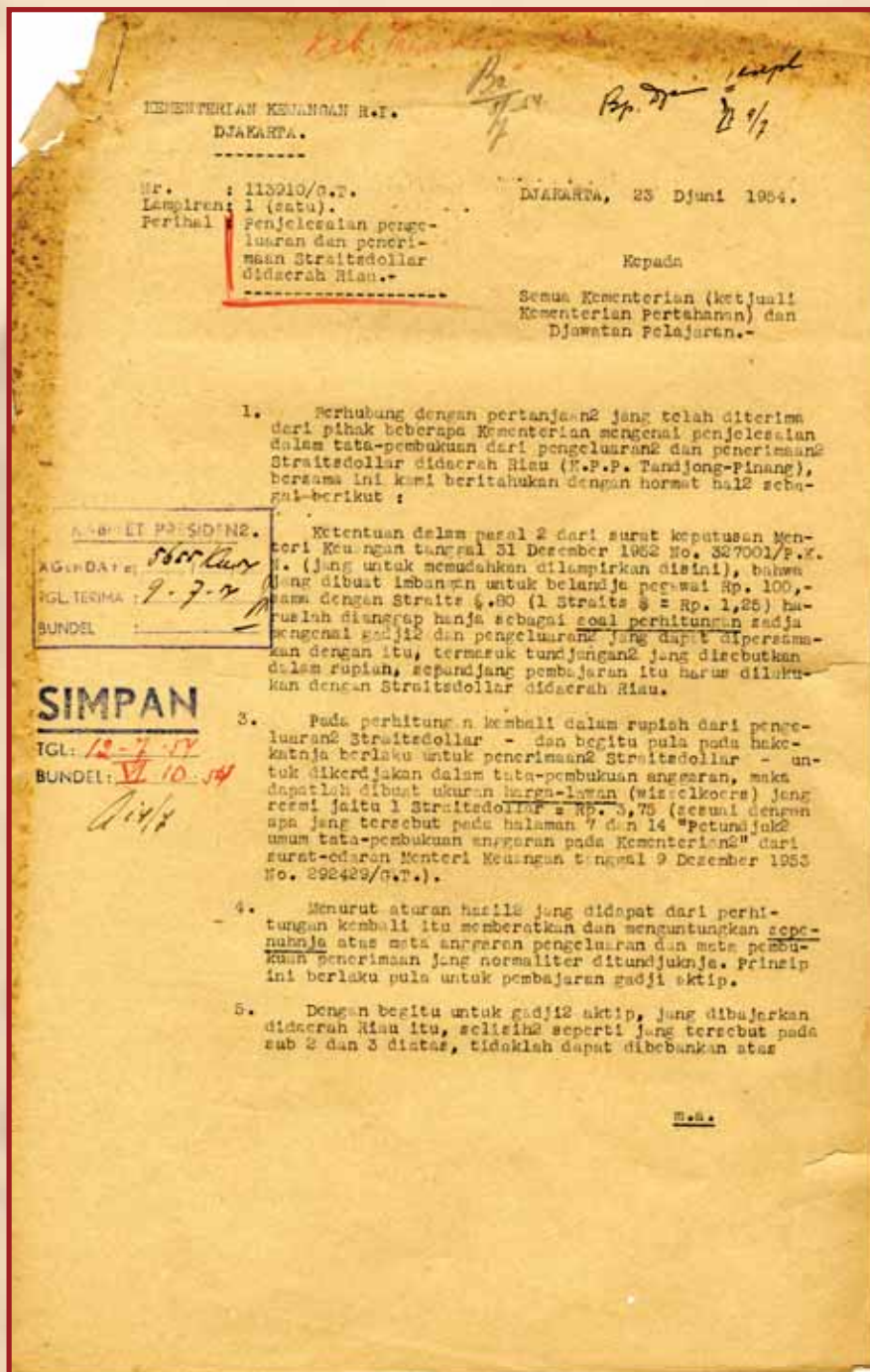
Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penyelenggaraan
tata usaha keuangan daerah otonom Sumatera Tengah dan
Kabupaten Riau,
24 Juni 1953.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 861



Surat Kepala Jawatan Perbendaharaan dan kas-kas Negeri kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Tanjungpinang tentang penyerahan pekerjaan tata usaha keuangan Kabupaten Riau mulai 1 Juli 1953, 9 Juni 1953.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 862



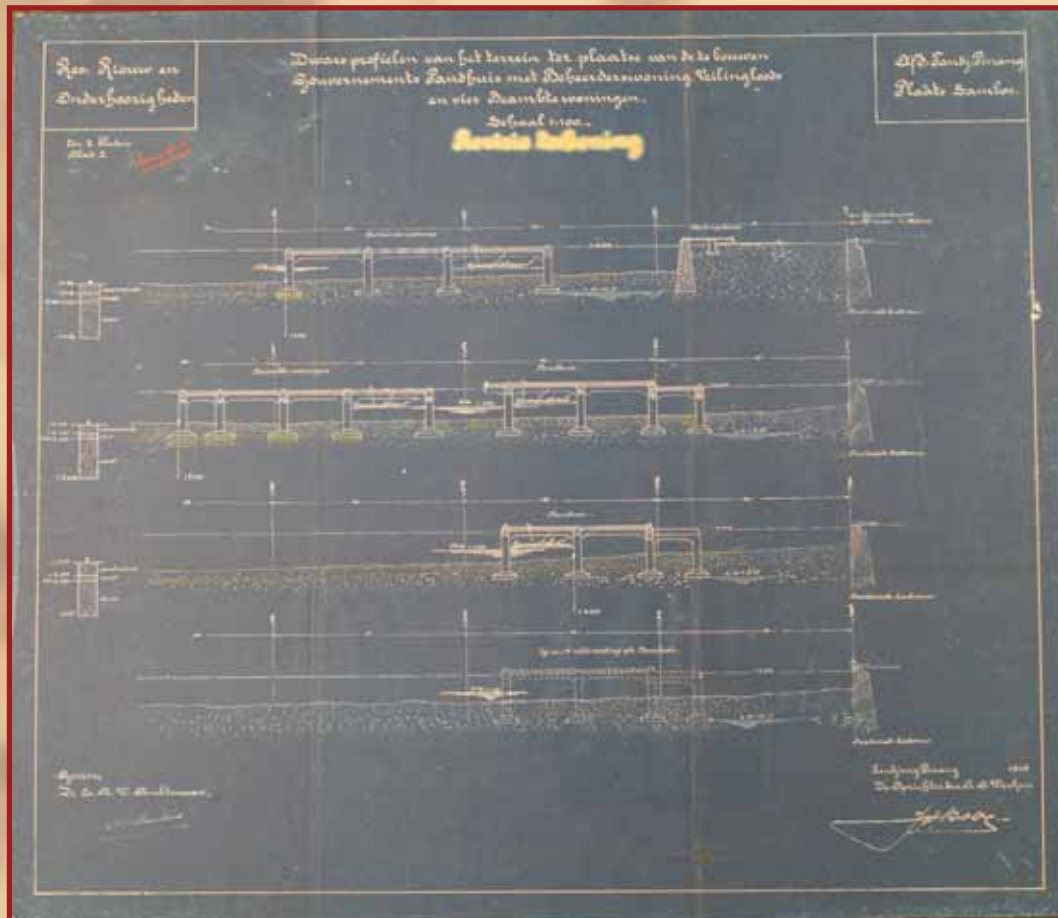
Surat dari Menteri Keuangan RI tentang penyelesaian pengeluaran dan penerimaan *Strait Dollar* di daerah Riau, 23 Juni 1954.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 343

A black and white photograph of a park path. The path is paved and leads into a dense forest of trees. On the right side of the path, there is a street lamp with a decorative top. The overall scene is peaceful and natural.

INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur jalan raya menuju pusat kota Tanjungpinang telah dimulai tahun 1930, berjalan seiring dengan perkembangan perekonomian di Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang. Pemberdayaan Gedung lelang pun termasuk infrastruktur yang jadi perhatian sangat tinggi di masa itu. Gambar letak sisi jalan raya Sungai Pulei untuk Tanjungpinang - Pengudang pun sebagai infrastruktur penting yang telah di mulai sejak tahun 1929.



Profil melintang penempatan pembangunan rumah gadai pemerintah, dengan rumah pejabat pegadaian dan empat rumah pegawainya, 1928.

Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 1345



Gambar letak sisi jalan raya Sungai Pulei untuk Tanjungpinang-Pengudang, 1929.

Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 1345



Jalan raya menuju pusat kota,
Tanjungpinang Pulau Bintan, Kepulauan Riau,
[1930].

Sumber: ANRI, KIT 0767/032



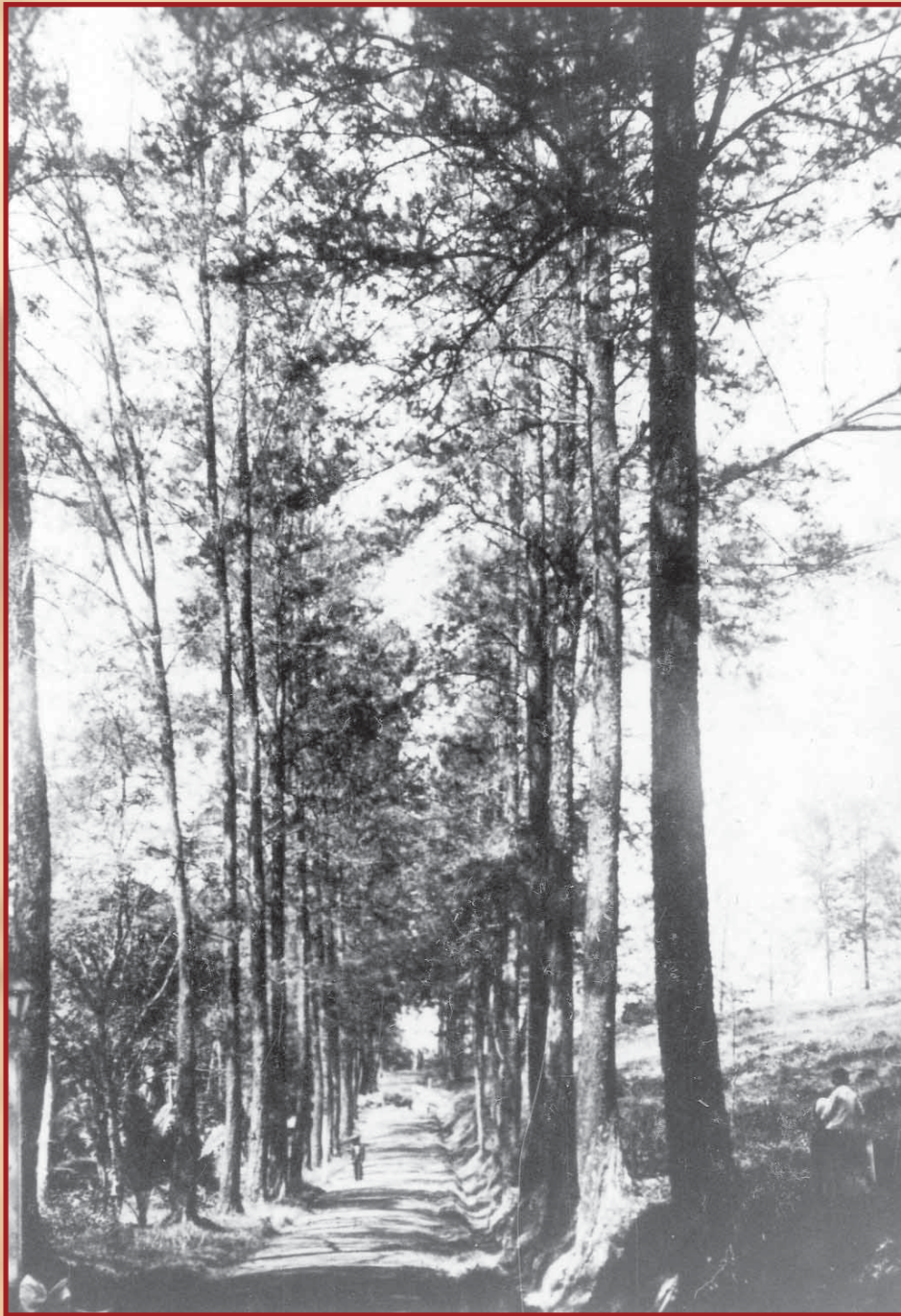
Rumah-rumah di Tanjungpinang, Pulau Bintan, Riau, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sumatera Bagian Selatan Riau dan Jambi 845/61



Pekarangan dan rumah, Tanjungpinang, Pulau Bintan, Riau,
[1930].

*Sumber: ANRI, KIT Sumatera Bagian Selatan Riau
dan Jambi 845/62*



Jajaran pohon cemara ditepi jalan Tanjungpinang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, [1930].

Sumber: ANRI, KIT 0675/017

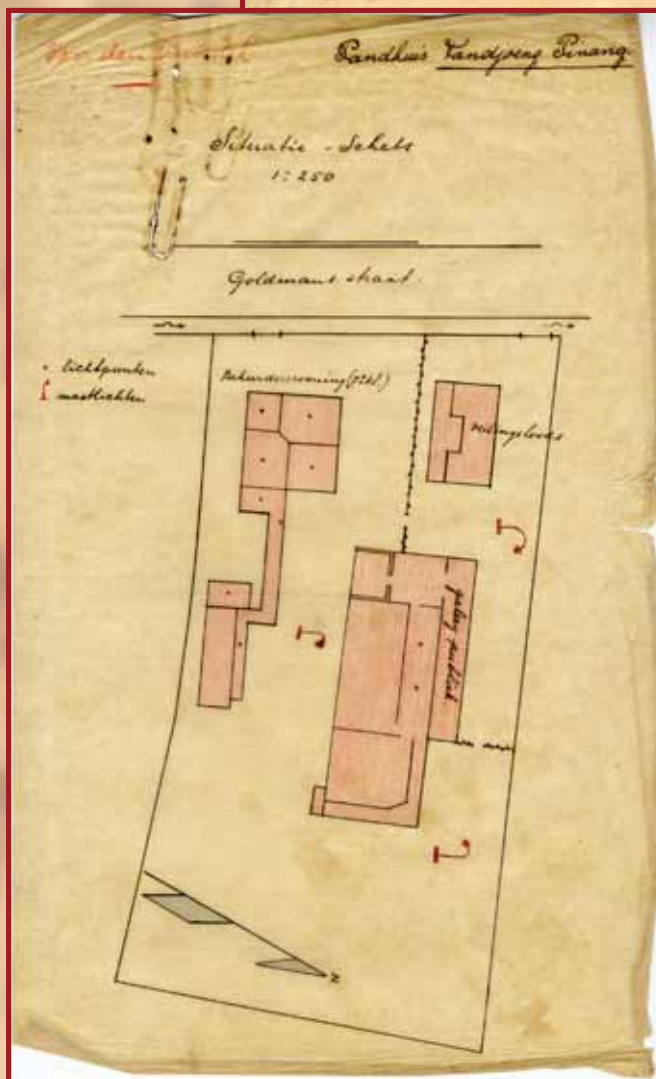
Ph.D.-

TANJONG PINANG, den 15 December 1930.

No. 2577/23/W.
Bijlagen: 14 w.o. 13
teekeningen.

ONDERWERP:

Verzoek om toezending van plattegrond- en si-
tuatietekeningen pandhuis Tandj:Pinang, Gumboe
en Tandj:Balaj (Karimoun).-



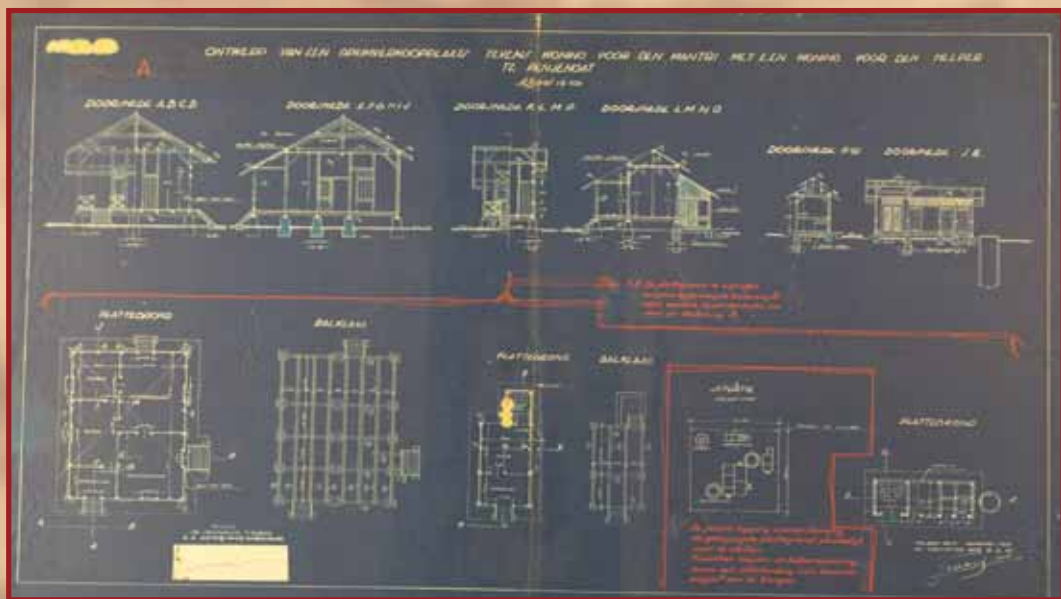
ng van een alhier ontvangen schrijven
r BOW. van 25 November jl. no. 1 5/49/24.
t ten overvloede hierbij wordt overge-
UNEG: hiërnevens de daarbij bedoelde
wen dienst aan te bieden.-

De Resident van
Nieuw en Onderhoorigheden;
i.w. Roest.
Voor menauidend afschrift;
De pr. Ingr. E.A. V. Wabtenaar;

Handwritten signature: P. Wabtenaar

Denah pembangunan rumah gadai di Tanjungpinang,
1930.

Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 1345



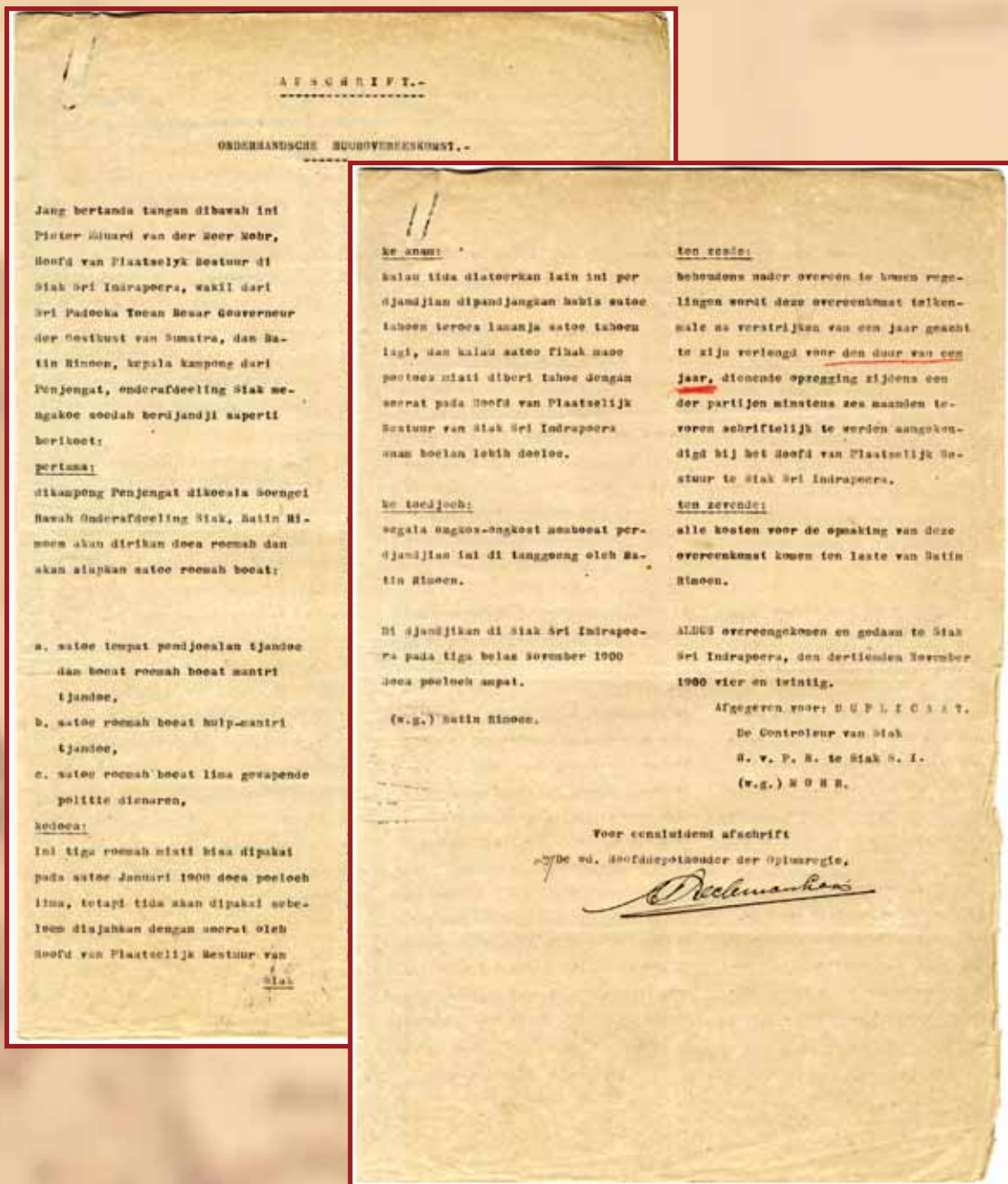
Gambar perencanaan tempat penjualan madat (*opiumverkoopplats*) disamping tempat tinggal mantri dan pembantunya di Penyengat, 1930.

Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 2023



Surat Keterangan dari Kerajaan Negeri Siak Sri Indrapoera tentang penyerahan sebidang tanah untuk membuat tempat penjualan candu bersama rumah manteri dan pembantunya di Penyengat, 29 September 1930.

Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 2023



Surat Perjanjian Sewa Menyewa bawah tangan tentang pendirian rumah untuk 1) tempat penjualan candu dan rumah untuk mantri candu, 2) rumah untuk hulp mantri candu, 3) gewapende politie dienaren di Penyengat, 1930.

Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 2023



Rumah-rumah penduduk di tepi pantai Pulau
Penyengat, Kepulauan Riau,
5 Agustus 1951.

*Sumber: ANRI, Kempen K 510805 EE 26 (atas);
Kempen K 510805 EE 28 (bawah)*



Bangunan bekas Istana Sultan Riau di Pulau Penyengat,
Kepulauan Riau,
5 Agustus 1951.

Sumber: ANRI, Kempen K 540805 EE 37



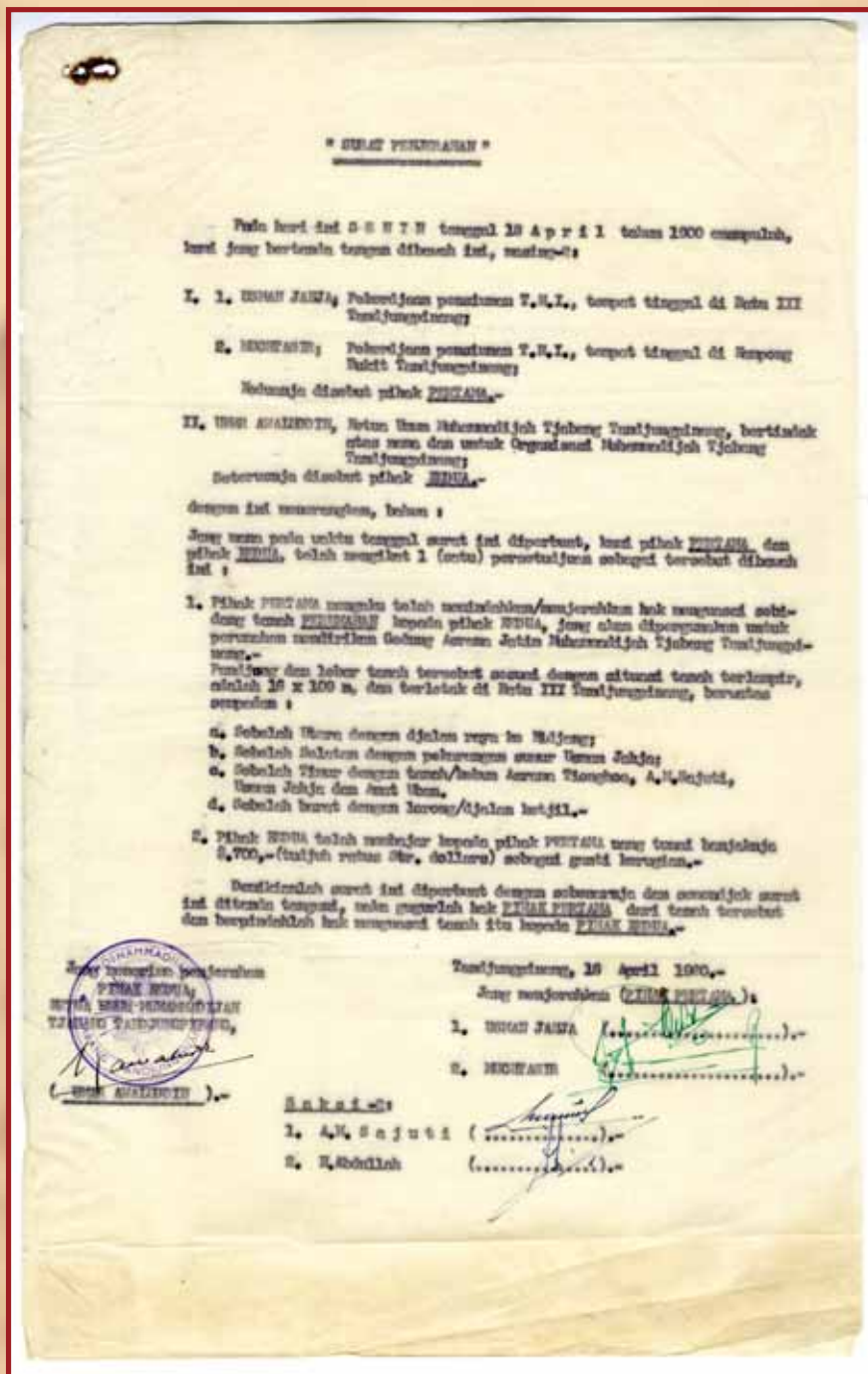
Reruntuhan bekas Istana Penyengat,
1951.

Sumber: ANRI, Kempen K 510805 EE 38

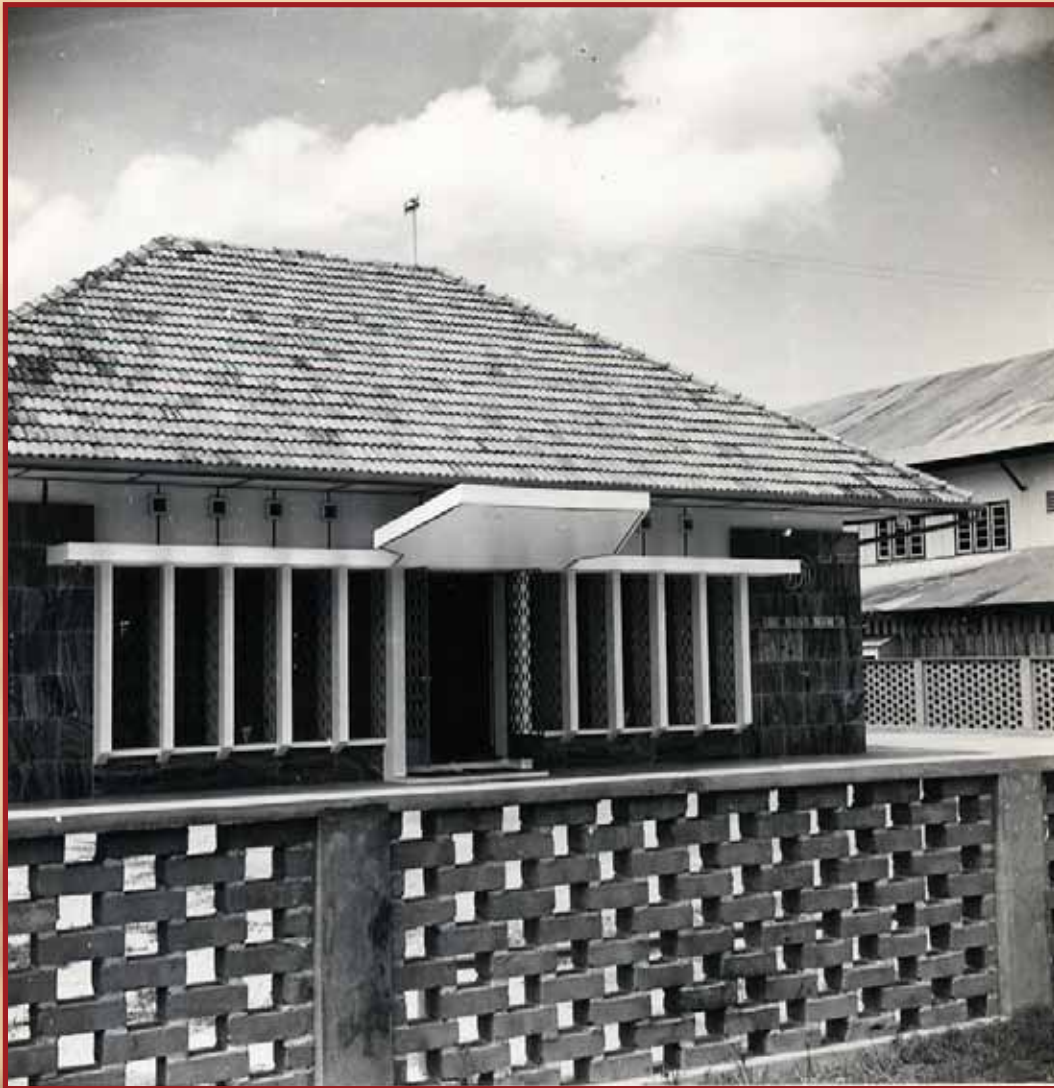


Kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Kepulauan Riau
di Tanjungpinang,
21 April 1953.

Sumber: ANRI, Kempen K 530421 EE 1



Surat mengenai penyerahan tanah kepada Muhammadiyah Cabang Tanjungpinang untuk pendirian gedung asrama yatim, 1960.
Sumber: ANRI, Muhammadiyah No. 603



Gedung Bank Negara Indonesia (BNI) di Tanjungpinang,
20 Januari 1964.

Sumber: ANRI, Kempen 64-868

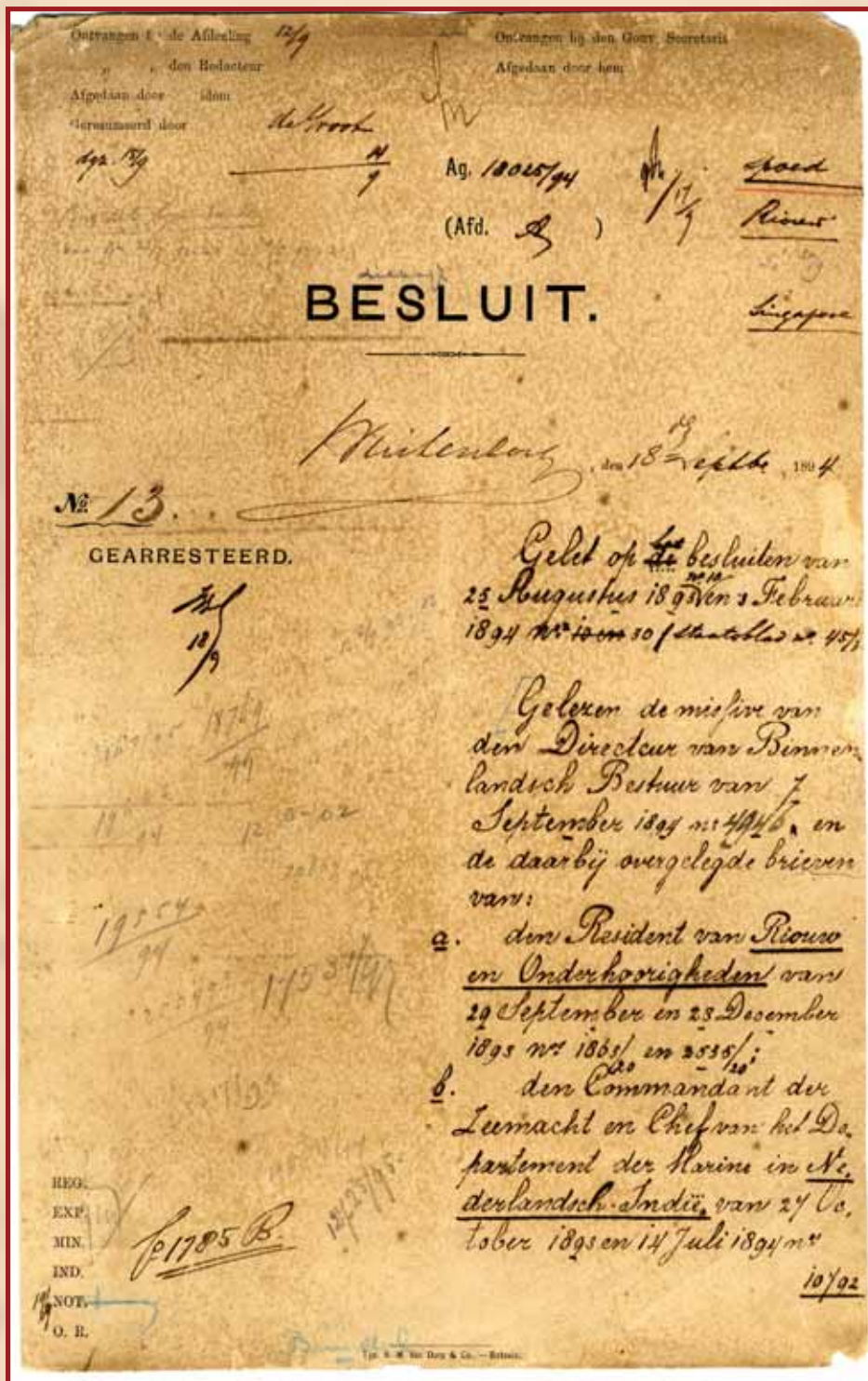


Gedung Radio Republik Indonesia (RRI)
di Tanjungpinang, 20 Januari 1964.
Sumber: ANRI, Kempen 64-968



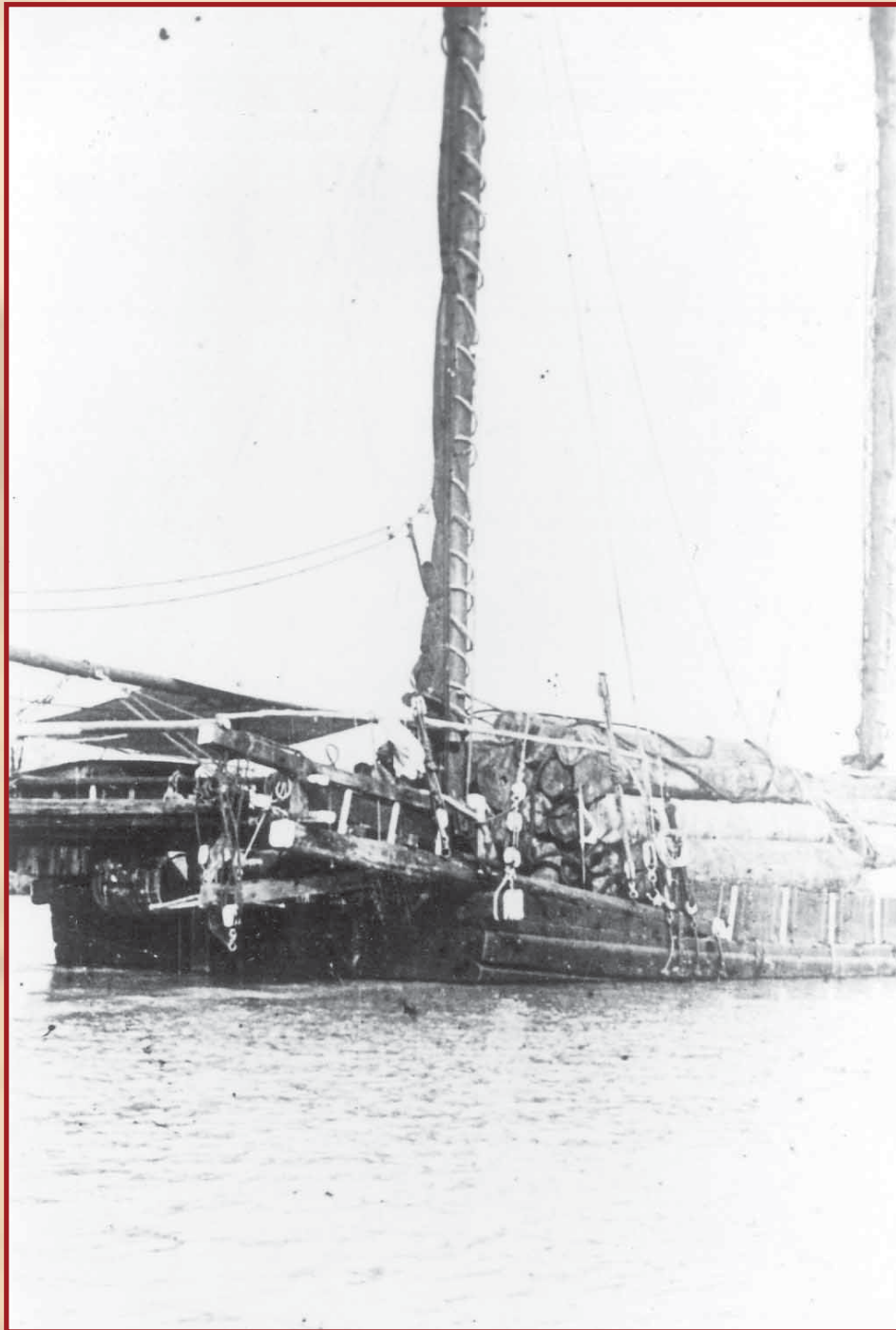
TRANSPORTASI

Kapal uap yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk kepentingan antar afdeling (bagian) di Tanjungpinang dan Indragiri, sudah dikenal sejak tahun 1893. Dinamika pemanfaatan alat transportasi seperti kendaraan umum bus dan taksi sudah dikenal sejak awal masa kemerdekaan, sejalan dengan berkembangnya pelabuhan laut yang telah mendominasi kegiatan perekonomian masyarakat dalam mengangkut kayu hasil hutan dengan Kapal tongkangnya, dapat terlihat dengan jelas melalui khasanah arsip yang terekam.



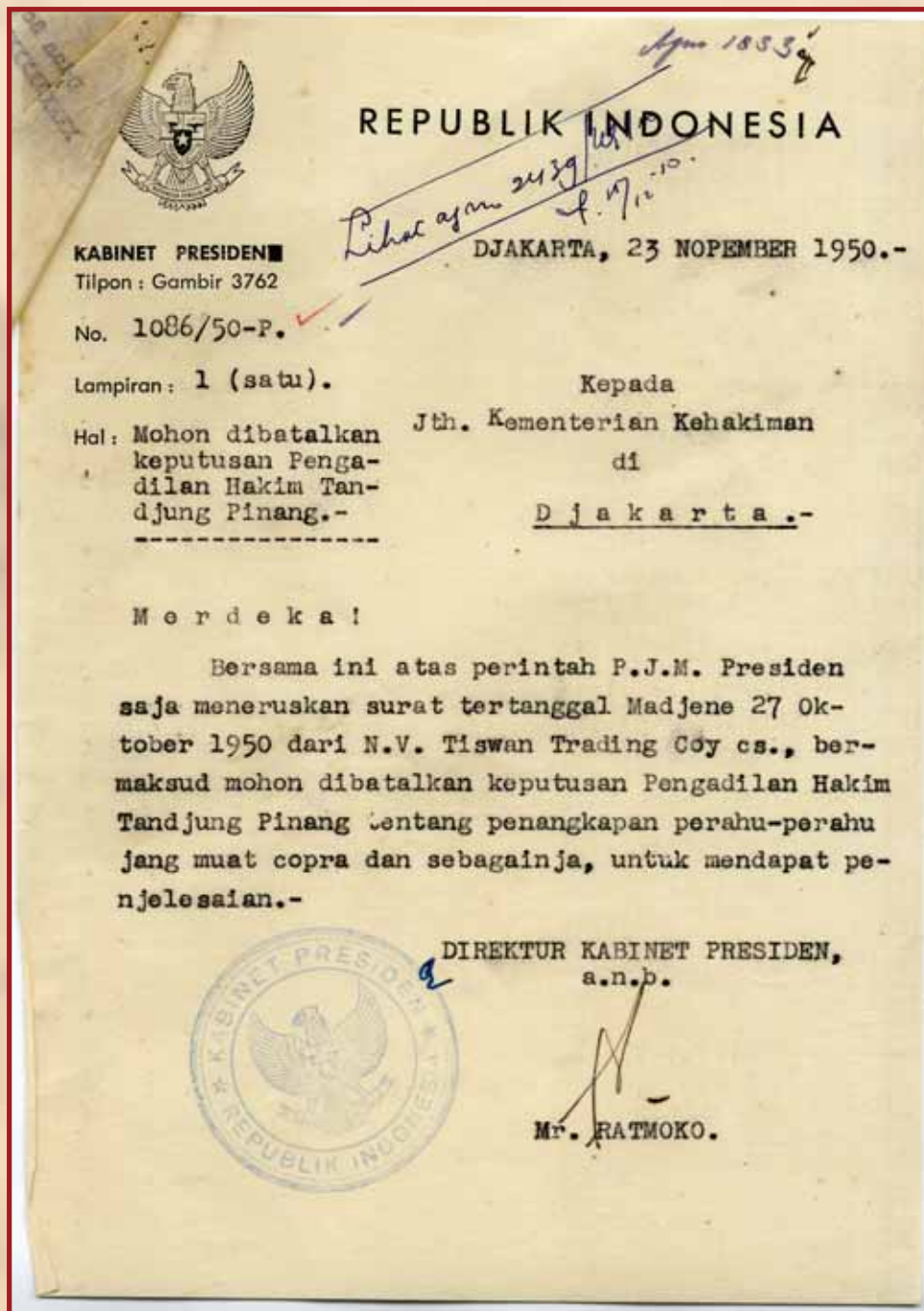
Surat Keputusan tentang pengaturan kapal uap di afdeling Tanjungpinang dan Indragiri, 1893-1894.

Sumber: ANRI, Grote Bundel Besluit No. 271



Kapal Tongkang membawa kayu, Penyengat, Bengkalis, Riau,
[1930].

*Sumber: ANRI, KIT Sumatera Bagian Selatan Riau
dan Jambi 541/41*



Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Kementerian Kehakiman tentang pembatalan keputusan hakim Tanjungpinang tentang penangkapan perahu-perahu yang bermuatan kopra dan sebagainya, 23 November 1950.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI No. 1530



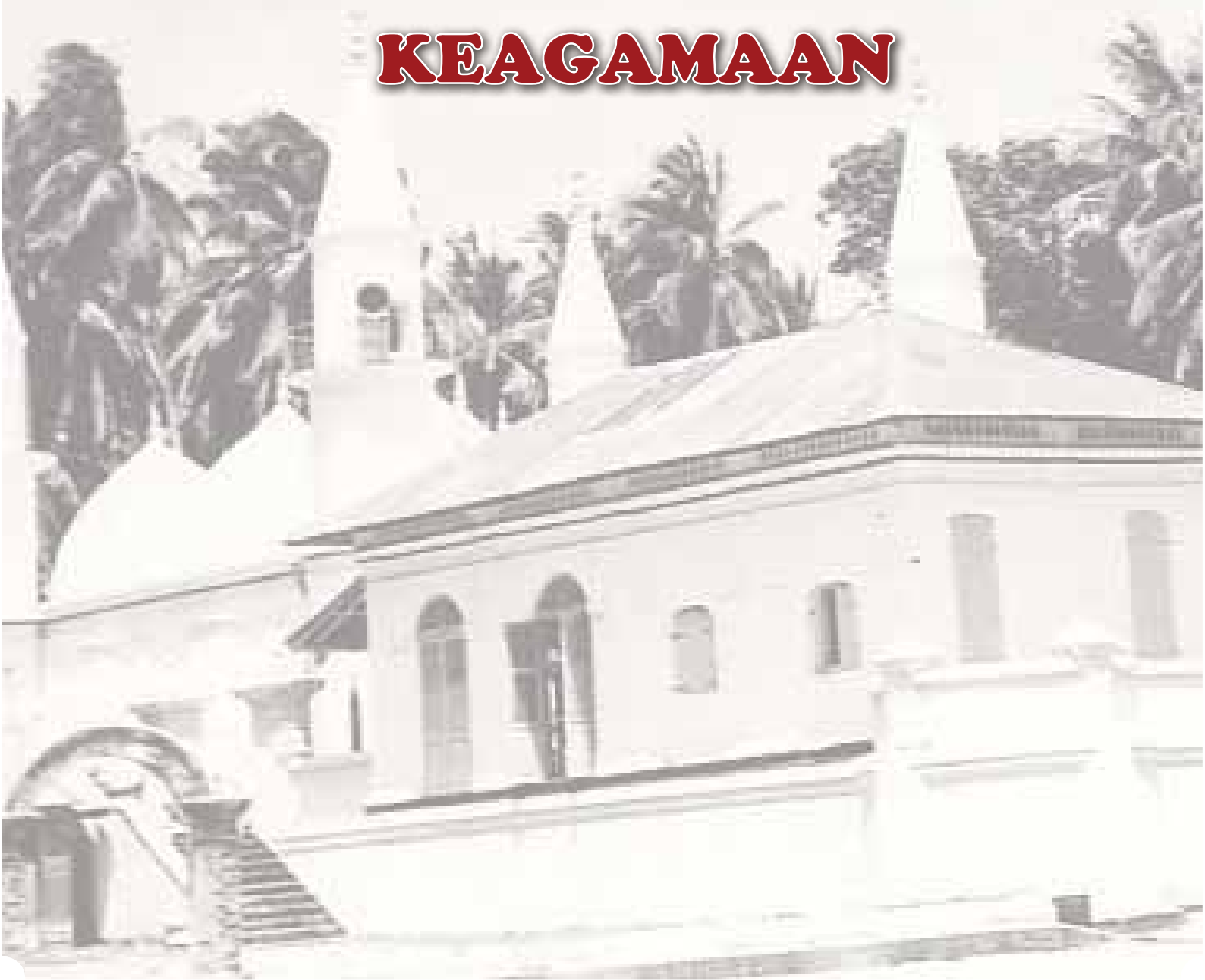
Pangkalan bis dan taksi, pemandangan kota Tanjungpinang, 1953.

Sumber: ANRI, Kempen K 530421 EE 3-1



Suasana Pelabuhan Tanjungpinang, 1958.
Sumber: ANRI, Kempen 80917 EE 3


KEAGAMAAN



Dinamika berkembangnya kelompok sosial masyarakat berbasis agama pada masa awal kemerdekaan, begitu cepat, salah satunya dengan berkembangnya organisasi Nahdlatul Ulama dengan adanya susunan pengurus Lembaga Seniman Muslimin Indonesia (LESBUMI) di Tanjung Pinang 18 Mei 1963.



Gereja Protestan di Tanjungpinang, Riau, [1930].
*Sumber: ANRI, KIT Sumatera Bagian Selatan Riau
dan Jambi 767/29*



PENGURUS BESAR NAHDLATUL 'ULAMA
 DTALAN RAYA MENTENG 24 — TELEPON 1392 GAMBIR — DJAKARTA - RAYA

DJAKARTA, 24 Desember 1956
 4 N o 1


1975.-
 56.-


No. 112 / V / 56.-
 Kepada
 2. Pengurus Tjebang Partai
 "NAHDLATUL-'ULAMA"
 di TANJUNGPINANG

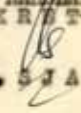
Prihal: Keanggotaan H. Sjamsuddin,-
 lamp. : _____

Bismillahir - rahmaanir - rahim

Assalamu'alaikum, war. wab.
 Saudara2 jang terhormat,
 Berasa ini kami beritahukan, bahas kami telah menerima salinan surat Saudara2 tanggal 22 Maret 1956 NO:24/Tjeb/N.U./I/56 jang Saudara2 kiriskan kepada Saudara H. Sjamsuddin, Hakim Pensiun di Tanjung Pinang.
 Berkhubung dengan itu kami minta dengan hormat, agar permintaan mendjadi anggota N.U. jang dimedjukan oleh Saudara H. Sjamsuddin tadi hendaknya Saudara2 terima. Karena walaupun dahulu beliau mendjadi anggota Parindra, namun sedjak beberapa lama beliau telah keluar dari partai tadi. Dan disamping itu beliau sediri sudah lama mengedalkan hubungan dengan kami.
 Dalam pada itu mengesani putusan Saudara2 tanggal 25 Desember 1955 jang menolak permintaan H. Sjamsuddin, memang keputusan Saudara2 itu beralasan. Karena pada waktu itu Saudara tadi masih mendjadi anggota Parindra. Alam tetapi sekarang ini karena beliau sudah keluar dari Parindra, maka "illet" dan alasan untuk menolak mendjadi anggota N.U. itu sudah tidak ada lagi.
 Demikianlah, berakibanya dengan penjelasan ini Saudara2 mohon edanya mengabulkan permintaan H. Sjamsuddin tadi.
 Selian. Terima kasih. WASSALAM.-

KEMPA UMUM,

 (K. S. W. DARILAH)

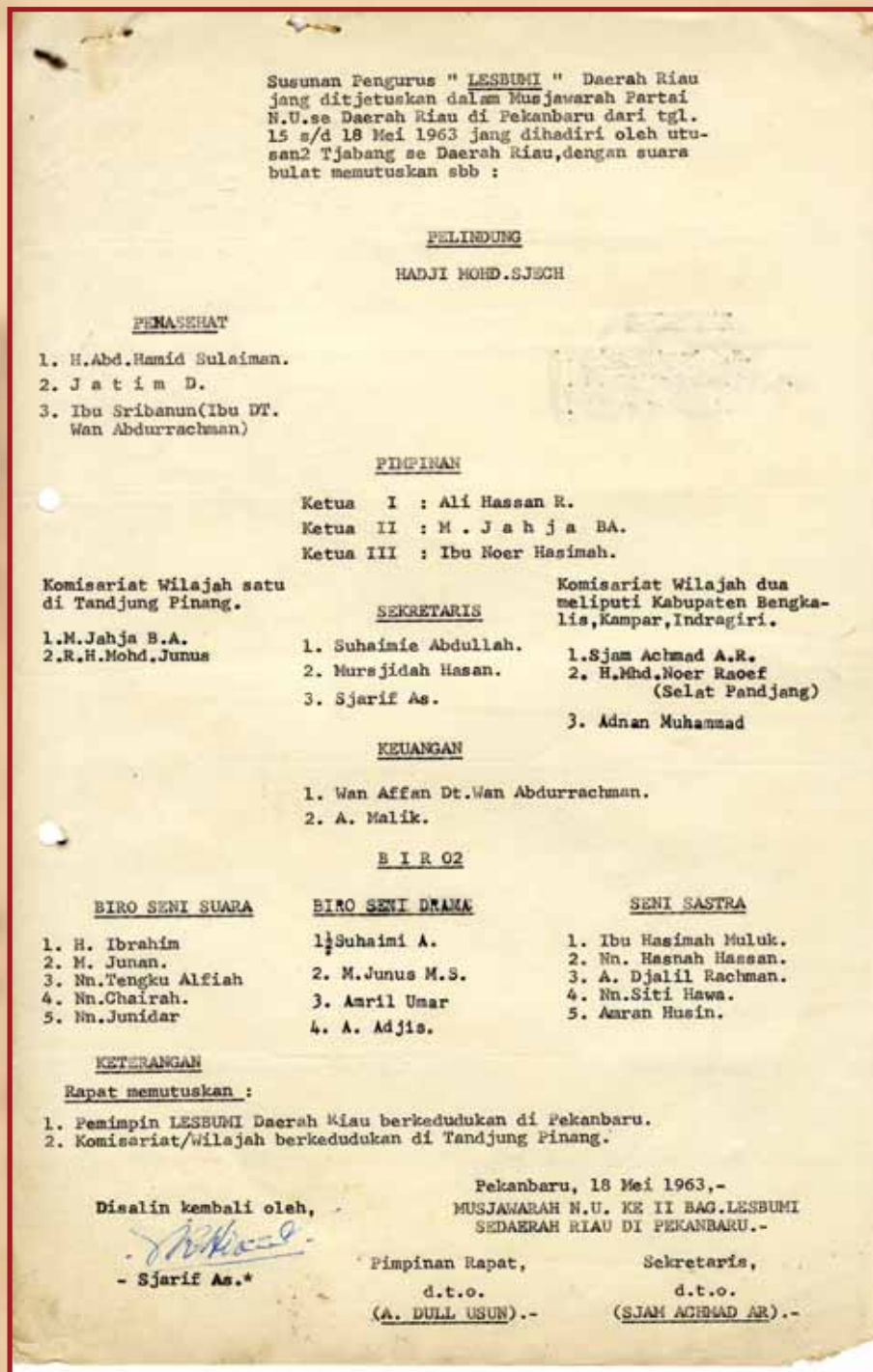


Pengurus Besar
 "PARTAI NAHDLATUL-'ULAMA"
 SEKRETARIS.

 (A. S. J. A. H. R. I.)

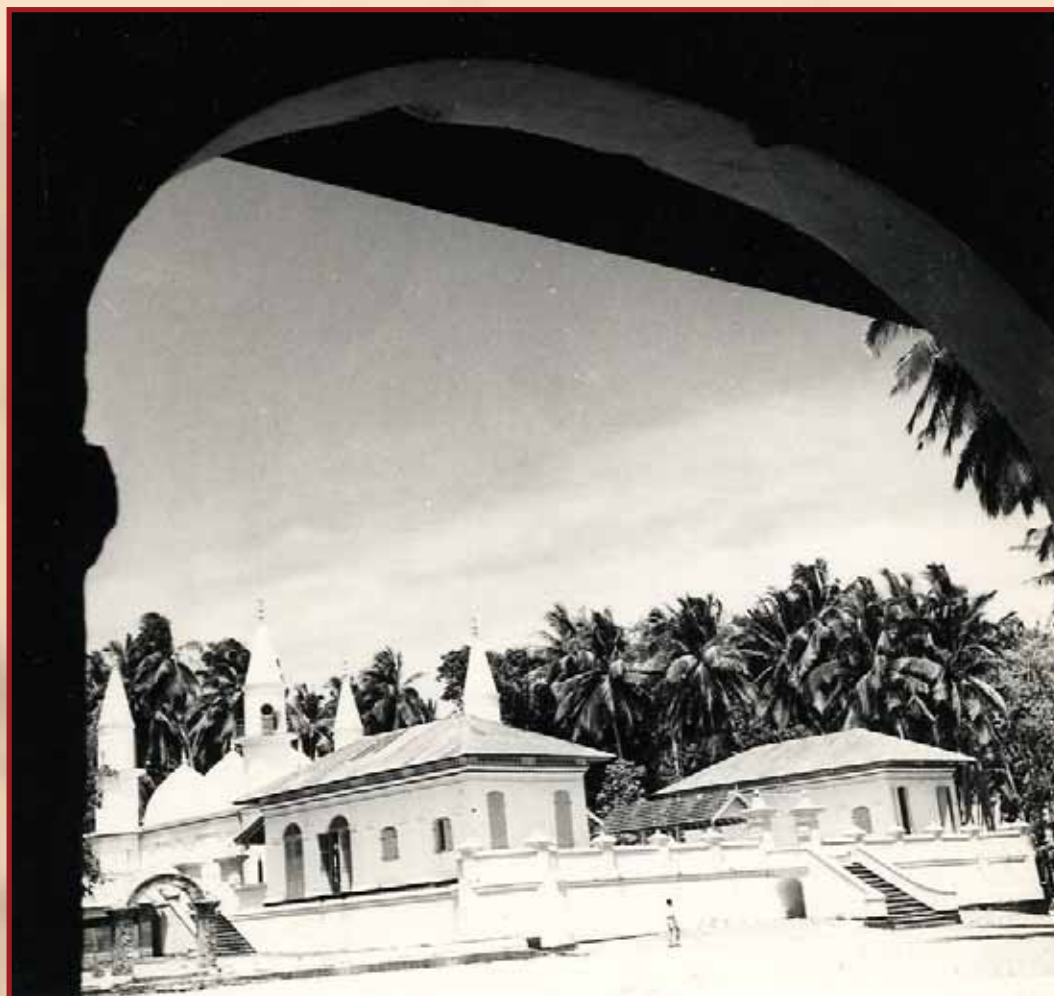
Tembusan untuk:
 1. Prof. H. Sjamsuddin, Jl. Tjempaka 9 di Tanjung pinang.
 2. Konsul P.S.N.U. Sumbeng, di Bukittinggi.
 3. Arsip.-

Surat dari pengurus besar Partai Nahdlatul Ulama kepada pengurus cabang Partai Nahdlatul Ulama di Tanjung Pinang tentang Keanggotaan H. Sjamsuddin, Hakim Pensiun di Tanjung Pinang, 1956

Sumber: ANRI, NU No. 1922



Susunan pengurus Lembaga Seniman Budayawan Muslimin
Indonesia (LESBUMI) Daerah Riau, termasuk
Tanjung Pinang,1963
Sumber: ANRI, NU No. 1922



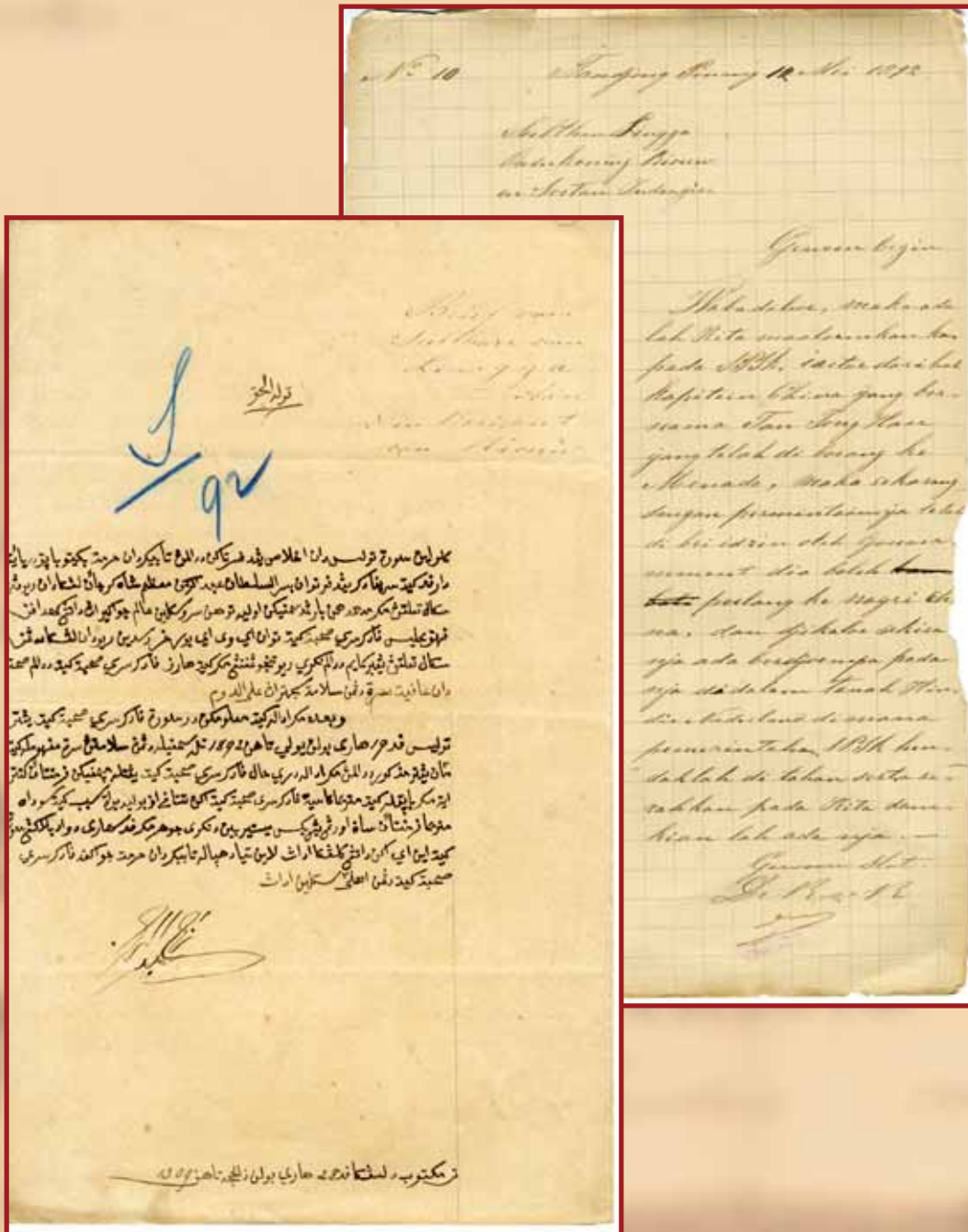
Masjid Raya di Tanjungpinang, Kepulauan Riau,
20 Januari 1964.

Sumber: ANRI, Kempen 64-836



SOSIAL BUDAYA

Disamping budaya Minang yang sangat berpengaruh dalam tari-tarian, yang sering ditampilkan secara resmi dalam penyambutan tamu istimewa Pemerintahannya, kebudayaan masyarakat sudah berinteraksi dengan budaya lain, pada tahun 1892 Sultan Lingga pun menerima dengan baik, seperti yang terekam dalam khasanah arsip.



Dokumen Sultan Lingga mengenai orang-orang Cina yang berada di Tanjungpinang, 1892.

Sumber: ANRI, Riouw No. 223.6



Pertunjukan Tarian Minang yang disajikan
di Gubernuran Tanjungpinang, 1959.

Sumber: ANRI, Kempen 590603 EE 9

DAFTAR ARSIP

A. GEOGRAFIS

1. Peta Wilayah Riau dan Lingga, termasuk pulau-pulaunya diputuskan 29 Oktober 1830. Sebelah Utara dibatasi oleh Selat Singapura, 1830.
Sumber: ANRI, Riau 73-a
2. Surat perjanjian mengenai perbatasan tanah Tanjong Pinang, 1899.
Sumber: ANRI, Riouw No. 225.1
3. Peta Pulau Singkep, Pulau Lingga, Pulau Bintan, Pulau Mendol (Residensi Riouw Onderhorigheden), 1924.
Sumber: ANRI, Topografi 64-94534-blad1-80
4. Situasi Peta Ibukota Tandjong Pinang, 1930.
Sumber: ANRI, BG BOW No. 7670
5. Peta Pulau Singkep, Pulau Lingga, Kepulauan Riouw, Tandjoeng Pinang, Pulau Bintan, Pulau Batam, Tanjung Balai Tambilahan Malaka (Tanjungpinang Sumatera), 1934.
Sumber: ANRI, Topografi 1403/Blad VI/70
6. Peta Tanjungpinang, Pulau Bintan, Pulau Rempang, Pulau Sedangka, Pulau Tamiang, Kepulauan Riouw (Tanjungpinang), 1944.
Sumber: ANRI, Topografi 1361/Sheet 33/69
7. Pembagian daerah administrasi Propinsi Riau dengan ibukota Pekanbaru, meliputi 4 Kabupaten, 1 kotapraja, 16 karesidenan, 62 kecamatan, 1961.
Sumber: ANRI, Marzuki Arifin No. 254

B. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

8. Kontrak antara kerajaan Riau dengan VOC 1 Nopember 1784 Masing-masing dihadiri oleh Sultan Mahmoet dan J.P. van Braam
Sumber: ANRI, Riau 70/1a
9. Surat dari Kesultanan Riau di Pulau Penyengat kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda tentang permohonan pengembalian

Kesultanan Johor yang Timmerman Theisjz selaku Penguasa Malaka kepada Sulthan 'Abdurrahman Syah, 1823.

Sumber: ANRI, Surat Emas No. 17

10. Salinan surat Sultan Lingga kepada Residen Riau dan wilayah sekitarnya mengenai laporan perjalanan Sultan Lingga ke Pulau Penjinjat (Pulau Penyengat, Batam), 15 April 1885.

Sumber: ANRI, Riouw 223/10

11. Stempel onderkoning van Riouw Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf bin Raja Ali, 1890 (1274 H).

Sumber: ANRI, Riouw 223.5

12. Konferensi Sumatera bertempat di Medan 24 Maret 1945. Tampak utusan dari Riau juga hadir yaitu Muhammad Afan (nantinya menjadi Wali Negara Riau) dan Raja Muhammad. Konferensi ini membahas kepentingan Sumatera dipimpin oleh pemerintah Belanda.

Sumber: ANRI, KIT Sumut 1106/84

13. Fragmen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1949 tentang pembentukan provinsi Sumatera Tengah, November 1949.

Sumber: ANRI, Sekretaris Negara No. 0177

14. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 1951 tentang Penetapan T. Ruslan Murohardjo sebagai Gubernur/ Kepala Daerah Sumatera Tengah, 28 Juni 1951.

Sumber: ANRI, Sekkab Keppres No. 329

15. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Asrama Polisi di Tanjungpinang, 20 April 1953.

Sumber: ANRI, Kempen K 530420 EE 34

16. Suasana rapat umum pada waktu kunjungan wakil Presiden Mohammad Hatta di Tanjungpinang, 20 April 1953.

Sumber: ANRI, Kempen K 530420 EE 11

17. Wakil Presiden Mohammad Hatta memakai perahu motor menuju ke Kapal Jadayat di Pantai Tanjungpinang, 16 April 1954.

Sumber: ANRI, Kempen 540416 EE 9

18. Wakil Presiden Mohammad Hatta disambut oleh perwira-perwira Angkatan Darat dan Laut saat tiba di Pelabuhan Tanjungpinang, 23 April 1954.
Sumber: ANRI, Kempen 540423 EE 1
19. Laporan M. Zain Busrie tentang rencana Dewan Banteng untuk merebut Kabupaten Kepulauan Riau, Tanjungpinang, 19 Februari 1958.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI No. 2123
20. Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan setibanya di lapangan terbang di Tanjungpinang, 6 September 1959.
Sumber: ANRI, Kempen 02/C/4-59
21. Presiden Soekarno menerima Sumpah Pelajar dari seorang pelajar di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 6 September 1959.
Sumber: ANRI, Kempen K 590906 EE 2-1
22. Gubernur Riau menyambut kunjungan Presiden Soekarno di Tanjungpinang, 1959.
Sumber: ANRI, Kempen Sumut 590906 EE 1-7
23. Pidato P.J.M Presiden pada rapat raksasa di Tanjungpinang, 6 September 1959.
Sumber: ANRI, Pidato Presiden No. 110
24. Foto bersama Presiden Soekarno beserta Ibu Hartini dan para pembesar Riau beserta Nyonya di ruang utama Gubernur Riau di Tanjungpinang, dalam suatu acara kunjungan Presiden ke Riau, 1959.
Sumber: ANRI, Kempen Sumut 590906 EE 12
25. Pelantikan Mr. S.M. Amin sebagai Kepala Daerah Sumatera Tk. I Riau di Tanjungpinang
Sumber: ANRI, Kempen Sumatera Utara
26. Undang-Undang Republik Indonesia tentang pembentukan Kota Tanjungpinang, 21 Juni 2001.
Sumber: ANRI, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2001

C. PENDIDIKAN

27. Wakil Presiden Mohammad Hatta dan rombongan mengunjungi Madrasah Nurul Islam di Tarempa, Tanjungpinang, 20 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen K 530420 EE 61
28. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Sekolah Taman Kanak-kanak di Rarempa, Tanjungpinang, 20 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen 530420 EE 75
29. Gedung Sekolah Teknik Pertama Bagian Perkapalan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 18 Maret 1954.
Sumber: ANRI, Kempen Ia
30. Surat mengenai pembukaan SMP Muhammadiyah Cabang Tanjungpinang, 1961.
Sumber: ANRI, Muhammadiyah No. 3661
31. Suasana pameran buku dengan para pengunjung di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 20 Januari 1964.
Sumber: ANRI, Kempen 64-812
32. Penerima tamu berpakaian daerah saat pameran buku di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 20 Januari 1964.
Sumber: ANRI, Kempen 64-848
33. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0576/o/1977 tentang pembukaan SMP Negeri III Bengkalis, SMP Negeri VII Pakanbaru, SMP Negeri IV Tanjung Pinang dan SMA Negeri Teluk Kuantan Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 8 Desember 1977.
Sumber: ANRI, Kepmendiknas Nomor: 0576/o/1977

D. PEREKONOMIAN

34. Permohonan biaya gedung lelang di Teluk Tanjungpinang Barat, beserta gambar dan rincian biaya, 1656.
Sumber: ANRI, Riau 97/a
35. Batas daerah-daerah di kerajaan Riau yang harus membayar pajak pendapatan seperti lada hitam/ putih, tontonan rakyat,

candu, babi, arak, dll, 1861.

Sumber: ANRI, Riouw No. 215.3

36. Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penyelenggaraan tata usaha keuangan daerah otonom Sumatera Tengah dan Kabupaten Riau, 24 Juni 1953.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 861

37. Surat Kepala Jawatan Perbendaharaan dan kas-kas Negeri kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Tanjungpinang tentang penyerahan pekerjaan tata usaha keuangan Kabupaten Riau mulai 1 Juli 1953, 9 Juni 1953.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 862

38. Surat dari Menteri Keuangan RI tentang penyelesaian pengeluaran dan penerimaan Strait Dollar di daerah Riau, 23 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden No. 343

E. INFRASTRUKTUR

39. Profil melintang penempatan pembangunan rumah gadai pemerintah, dengan rumah pejabat pegadaian dan empat rumah pegawainya, 1928.

Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 1345

40. Gambar letak sisi jalan raya Sungai Pulei untuk Tanjungpinang-Pengudang, 1929.

Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 1345

41. Jalan raya menuju pusat kota, Tanjungpinang Pulau Bintan, Kepulauan Riau, [1930].

Sumber: ANRI, KIT 0767/032

42. Rumah-rumah di Tanjungpinang, Pulau Bintan, Riau, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sumatera Bagian Selatan Riau dan Jambi 845/61

43. Pekarangan dan rumah, Tanjungpinang, Pulau Bintan, Riau, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Sumatera Bagian Selatan Riau dan

Jambi 845/62

44. Jajaran pohon cemara ditepi jalan Tanjungpinang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau, [1930].
Sumber: ANRI, KIT 0675/017
45. Denah pembangunan rumah gadai di Tanjungpinang, 1930.
Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 1345
46. Gambar perencanaan tempat penjualan madat (opiumverkoopplats) disamping tempat tinggal mantri dan pembantunya di Penyengat, 1930.
Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 2023
47. Surat Keterangan dari Kerajaan Negeri Siak Sri Indrapoera tentang penyerahan sebidang tanah untuk membuat tempat penjualan candu bersama rumah mantri dan pembantunya di Penyengat, 29 September 1930.
Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 2023
48. Surat Perjanjian Sewa Menyewa bawah tangan tentang pendirian rumah untuk 1) tempat penjualan candu dan rumah untuk mantri candu, 2) rumah untuk hulp mantri candu, 3) gewapende politie dienaren di Penyengat, 1930.
Sumber: ANRI, Grote Bundel BOW No. 2023
49. Rumah-rumah penduduk di tepi pantai Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, 5 Agustus 1951.
Sumber: ANRI, Kempen K 510805 EE 26 (atas); Kempen K 510805 EE 28 (bawah)
50. Bangunan bekas Istana Sultan Riau di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, 5 Agustus 1951.
Sumber: ANRI, Kempen K 540805 EE 37
51. Reruntuhan bekas Istana Penyengat, 1951.
Sumber: ANRI, Kempen K 510805 EE 38
52. Kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Kepulauan Riau di Tanjungpinang, 21 April 1953.
Sumber: ANRI, Kempen K 530421 EE 1

F. KEAGAMAAN

53. Surat mengenai penyerahan tanah kepada Muhammadiyah Cabang Tanjungpinang untuk pendirian gedung asrama yatim, 1960.
Sumber: ANRI, Muhammadiyah No. 603
54. Gedung Bank Negara Indonesia (BNI) di Tanjungpinang, 20 Januari 1964.
Sumber: ANRI, Kempen 64-868
55. Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) di Tanjungpinang, 20 Januari 1964.
Sumber: ANRI, Kempen 64-968

G. TRANSPORTASI

56. Surat Keputusan tentang pengaturan kapal uap di afdeling Tanjungpinang dan Indragiri, 1893-1894.
Sumber: ANRI, Grote Bundel Besluit No. 271
57. Kapal Tongkang membawa kayu, Penyengat, Bengkalis, Riau, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumatera Bagian Selatan Riau dan Jambi 541/41
58. Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Kementerian Kehakiman tentang pembatalan keputusan hakim Tanjungpinang tentang penangkapan perahu-perahu yang bermuatan kopra dan sebagainya, 23 November 1950.
Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI No. 1530
59. Pangkalan bis dan taksi, pemandangan kota Tanjungpinang, 1953.
Sumber: ANRI, Kempen K 530421 EE 3-1
60. Suasana Pelabuhan Tanjungpinang, 1958.
Sumber: ANRI, Kempen 80917 EE 3

H. KEAGAMAAN

61. Gereja Protestan di Tanjungpinang, Riau, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Sumatera Bagian Selatan Riau dan Jambi 767/29
62. Surat dari pengurus besar Partai Nahdlatul Ulama kepada pengurus cabang Partai Nahdlatul Ulama di Tanjung Pinang tentang Keanggotaan H. Sjamsuddin, Hakim Pensiun di Tanjung Pinang, 1956
Sumber: ANRI, NU No. 1922
63. Susunan pengurus Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI) Daerah Riau, termasuk Tanjung Pinang, 1963
Sumber: ANRI, NU No. 1922
64. Masjid Raya di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 20 Januari 1964.
Sumber: ANRI, Kempen 64-836
65. Dokumen Sultan Lingga mengenai orang-orang Cina yang berada di Tanjungpinang, 1892.
Sumber: ANRI, Riouw No. 223.6
66. Pertunjukan Tarian Minang yang disajikan di Gubernuran Tanjungpinang, 1959.
Sumber: ANRI, Kempen 590603 EE 9

PENUTUP

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Kota Tanjungpinang Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Citra Kota Tanjungpinang Dalam Arsip

Pengarah

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Mustari Irawan

Deputi Bidang Konservasi Arsip

M. Taufik

Ketua

Agus Santoso

Editor

Senja Kala Yahya

Anggota

R. Suryagung

Abdul Cholik

Bayu Patriasari



Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

[http//www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), e-mail: info@anri.go.id